

# TESIS

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PEMANFAATAN  
SISTEM INFORMASI TERHADAP PENGELOLAAN BARANG  
MILIK NEGARA DENGAN KOMITMEN PIMPINAN SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI**

***THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCE,  
INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND THE USE OF  
INFORMATION SYSTEMS ON THE MANAGEMENT OF  
STATE-OWNED PROPERTY WITH LEADERSHIP  
COMMITMENT AS A MODERATION VARIABLE***

**MASDAYATI  
A062222035**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# TESIS

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PEMANFAATAN  
SISTEM INFORMASI TERHADAP PENGELOLAAN BARANG  
MILIK NEGARA DENGAN KOMITMEN PIMPINAN SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI**

***THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCE,  
INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND THE USE OF  
INFORMATION SYSTEMS ON THE MANAGEMENT OF  
STATE-OWNED PROPERTY WITH LEADERSHIP  
COMMITMENT AS A MODERATION VARIABLE***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**MASDAYATI  
A062222035**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# TESIS

## PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI TERHADAP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN KOMITMEN PIMPINAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

disusun dan diajukan oleh

**MASDAYATI**  
**A062222035**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

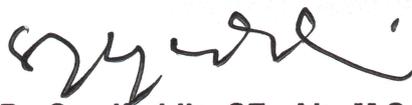
Pada tanggal 25 Juli 2024

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Syarifuddin, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA.  
NIP. 1963021019990021001



Dr. Darmawati, SE. Ak., M. Si.  
NIP. 196705181998022001

Ketua Program Studi  
Magister Akuntansi



Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., CA.  
NIP. 196811251994122002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.  
NIP. 196402051988101001

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Masdayati  
NIM : A062222035  
Jurusan/Program studi : Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI  
TERHADAP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN KOMITMEN  
PIMPINAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,

2024

Yang Membuat Pernyataan



Masdayati

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) pada program Pendidikan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si., CA. Selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan juga sebagai penguji yang selalu memberikan motivasi dan nasehat dalam penyelesaian studi;
4. Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA. dan ibu Dr. Darmawati, S.E. Ak., M.Si. selaku dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan dengan peneliti.
5. Prof. Dr. Mediaty, S.E., Ak., M.Si., CA. dan Dr. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA. selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan terhadap perbaikan dan kesempurnaan tesis ini;
6. Kepala BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menempuh pendidikan;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah memberikan izin untuk menempuh pendidikan;

8. Bapak Mat Nasir, S.H., MSP., selaku Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BBWS Pompengan Jeneberang yang memberikan semangat kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan;
9. Kepala Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berlokasi di Sulawesi Selatan atas pemberian izin untuk melakukan penelitian serta kepada segenap pegawai Satuan Kerja Kementerian PUPR yang berlokasi di Sulawesi Selatan yang telah memberi andil yang sangat besar dalam pelaksanaan penelitian ini;
10. Suami tercinta Abdul Muis serta anak-anak tersayang Adam dan Nemar yang selalu sabar serta mendoakan peneliti dalam menyelesaikan studi ini;
11. Teman-teman Magister Super Spesialis Akuntansi Sektor Publik Angkatan dua Inaya, Evelin, Fitri, Wahyu, Vandy dan Niswar yang selalu kompak dan memberikan semangat dan dukungan selama proses perkuliahan hingga selesainya masa studi;
12. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, 2024

Peneliti

## ABSTRAK

MASDAYATI. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Sistem Informasi terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Komitmen Pimpinan sebagai Variabel Moderasi (dibimbing oleh Syarifuddin dan Darmawati).*

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara dengan komitmen pimpinan sebagai variabel moderasi. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian yang dilaksanakan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berlokasi di wilayah Sulawesi Selatan sebanyak 21 Satuan Kerja dengan pemilihan sampel secara *purposive sampling*. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan menggunakan metode survei. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis melalui analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi dengan SPSS 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik negara, komitmen pimpinan dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern dan pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak dimoderasi oleh komitmen pimpinan terhadap pengelolaan barang milik negara pada Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Sulawesi Selatan.

Kata kunci: kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan sistem informasi, pengelolaan barang milik negara, komitmen pimpinan



## ABSTRACT

MASDAYATI. *The Effect of Human Resource Competence, Internal Control System, and the Use of Information Systems on the Management of State-Owned Property with Leadership Commitment as a Moderation Variable* (supervised by Syarifuddin and Darmawati)

This research aims to examine and analyze the effect of human resource competence, internal control systems, and the use of information systems on the Management of State-Owned Property with commitment as a moderating variable. The sample for this research was officials and employees managing state property consisting of 21 PUPR Ministry Work Units in the region of South Sulawesi who were selected based on purposive sampling. This research used a quantitative approach and primary data were processed using the SPSS 24 application. The data were validated using validity and reliability tests. This research show that human resource competency partially has a significant positive effect on the Management of State-Owned Property; internal control has a significant positive effect on the Management of State-Owned Property, while the use of information systems has a significant positive effect on the Management of State-Owned Property. Apart from that, organizational commitment cannot moderate the effect of human resource competence on the Management of State-Owned Properties, but leadership commitment can moderate the effect of internal control on the Management of State-Owned Properties, and leadership commitment can moderate the effect of the use of information systems on the Management of State-Owned Properties.

Keywords: human resources, internal control, information systems, commitment, Management of State-Owned Property



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Kegunaan Penelitian .....	10
1.5. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep .....	12
2.1.1. Teori Pertanggungjawaban ( <i>Stewardship Theory</i> ) .....	12
2.1.2. Aset .....	15
2.1.3. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) .....	16
2.1.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	22
2.1.5. Sistem pengendalian intern .....	24
2.1.6. Pemanfaatan Sistem Informasi .....	27
2.1.7. Komitmen Pimpinan .....	29
2.2. Telaah Riset terdahulu .....	30
<b>BAB III RERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b> .....	<b>33</b>
3.1. Rerangka Konseptual.....	33
3.2. Hipotesis Penelitian.....	34
3.2.1. Kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan barang milik negara .....	34
3.2.2. Sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan barang milik negara.....	35
3.2.3. Pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara.....	36
3.2.4. Komitmen pimpinan memoderasi kompetensi sumber daya manusia, informasi terhadap pengelolaan barang milik negara .....	37
3.2.5. Komitmen pimpinan memoderasi sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan barang milik negara.....	38
3.2.6. Komitmen pimpinan memoderasi pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara.....	39
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
4.1. Rancangan Penelitian .....	41
4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41

4.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .....	41
4.4. Jenis dan Sumber Data .....	43
4.5. Metode Pengumpulan Data .....	43
4.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	44
4.7. Instrumen Penelitian .....	46
4.8. Teknik Analisis Data.....	46
<b>BAB V HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
5.1 Deskripsi Data .....	50
5.1.1 Gambaran Umum Responden.....	50
5.1.2 Analisa Deskripsi Responden.....	50
5.2 Analisa Statistik Deskriptif.....	52
5.3 Uji Validitas .....	59
5.4 Uji Reliabilitas .....	61
5.5 Uji Asumsi Klasik .....	62
5.5.1 Uji Normalitas.....	62
5.5.2 Uji Multikolinearitas .....	64
5.5.3 Uji Heterokedastisitas .....	65
5.6 Uji Hipotesis .....	66
5.6.1 Analisis Regresi .....	66
5.6.2 Analisis Regresi Moderasi .....	70
<b>BAB VI PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
6.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara.....	71
6.2 Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara .....	72
6.3 Pemanfaatan Sistem Informasi Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara.....	74
6.4 Komitmen pimpinan tidak dapat memoderasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Barang Milik Pemerintah. ....	74
6.5 Komitmen Pimpinan dapat memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara.....	76
6.6 Komitmen Pimpinan Dapat Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara.....	77
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
7.1 Kesimpulan .....	81
7.2 Implikasi.....	84
7.3 Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Asumsi dasar teori <i>stewardship</i> .....	12
4.1 Populasi dan Sampel .....	42
4.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	45
5.1 Deskripsi Responden Penelitian .....	51
5.2 Makna Penilaian Secara Deskriptif Variabel Penelitian .....	52
5.3 Hasil statistik deskriptif Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) .....	53
5.4 Hasil statistik deskriptif Sistem Pengendalian Internal (X2) .....	54
5.5 Hasil statistik deskriptif Pemanfaatan Sistem Informasi (x3).....	56
5.6 Hasil statistik deskriptif Variabel Pengelolaan Barang Milik Negara (Y) ....	57
5.7 Hasil statistik deskriptif Variabel Komitmen Pimpinan (Z).....	58
5.8 Hasil Uji Validitas .....	60
5.9 Hasil Uji Reliabilitas .....	61
5.11 Hasil Uji Normalitas .....	62
5.12 Hasil Uji Multikolinieritas .....	64
5.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	65
5.14 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	67
5.15 Uji Summary .....	68
5.16 Hasil Uji T .....	69
5.17 Uji Summary Moderasi .....	71
5.18 Hasil Analisis Regresi Moderasi .....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Konseptual .....	34
5.1 Hasil Uji Normalitas .....	63
5.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	66

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Kuesioner.....	89
2 Hasil Uji Data SPSS 24 .....	94

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Untuk menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian/Lembaga wajib melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi berbagai kepentingan publik seperti penyediaan infrastruktur, transportasi, irigasi dan berbagai layanan publik lainnya. Pengelolaan barang milik negara tersebut dilaksanakan agar semua aset negara tercatat dengan baik, menggambarkan keadaan (kondisi, jumlah dan nilai) yang benar dan sewajarnya, serta taat asas baik asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan asas kepastian nilai dalam rangka pemenuhan kebutuhan laporan manajemen sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat (Pratiwi, 2022).

Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang bertanggung jawab dan berwenang dalam hal penetapan pedoman dan kebijakan dalam pengelolaan barang milik negara sedangkan Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang mempunyai wewenang dalam menggunakan barang milik negara yang dibantu oleh Kuasa Pengguna Barang yaitu Pejabat atau Kepala Satuan Kerja (Satker) mendapatkan kuasa dari Pengguna Barang dalam mengelola Barang Milik Negara dalam penguasaannya (Kementerian Keuangan, 2015). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pengguna barang berperan serta memiliki pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa aset yang dikuasainya dikelola dengan baik sebagai upaya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya terutama pada kesejahteraan masyarakat. Satuan Kerja (Satker) Kementerian PUPR di Sulawesi Selatan

adalah Kuasa Pengguna Barang yang memiliki peran penting dalam pengelolaan barang milik negara yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga terwujudnya infrastruktur berupa jalan, jembatan, irigasi, jaringan, air bersih dan sebagainya yang Handal dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan secara menyeluruh.

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2020 bahwa Kementerian PUPR menjadi kementerian dengan aset barang milik negara terbesar mencapai Rp. 1.937,73 triliun atau sekitar 29 % dari aset barang milik negara yang dimiliki Pemerintahan pusat secara keseluruhan (Kementerian Keuangan, 2021). Aset yang dikelola oleh Kementerian PUPR tersebar di seluruh provinsi termasuk Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah aset yang sangat besar, tentunya tidak mudah dalam pengelolaannya dan memerlukan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Permasalahan pengelolaan aset tetap yang diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2022 bahwa pengendalian atas pengelolaan Aset Tetap belum memadai dan merupakan temuan yang berulang dari tahun-tahun sebelumnya yaitu terdapat aset barang milik negara yang tidak diketahui keberadaannya, aset tetap yang belum ditetapkan status penggunaannya, aset tetap berupa tanah tidak dilengkapi dengan sertifikat tanah/bukti hak milik, aset tetap dimanfaatkan tidak mengikuti aturan yang berlaku, penatausahaan aset tetap tidak tertib dan terdapat barang milik negara yang sudah usang akan tetapi belum dihapuskan dan masih membebani neraca Kementerian serta permasalahan signifikan lainnya (BPK RI, 2023).

Tim BPK RI mengungkapkan bahwa salah satu penyebabnya sehingga permasalahan tersebut berulang dan tidak diselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya karena Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang belum sepenuhnya optimal melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam

pengelolaan barang milik negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 tahun 2021 menyebutkan bahwa merupakan kewenangan KPB yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengawasan pengendalian untuk penggunaan aset negara yang dikuasainya meliputi pelaksanaan penggunaan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, pengamanan serta pemanfaatan.

Terhadap temuan tersebut tim BPK RI merekomendasikan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan aset tetap dan aset lainnya dengan menetapkan langkah-langkah perbaikan dari aspek regulasi dan kebijakan, pengendalian dan sistem informasi serta mempercepat proses pelaksanaan sertifikasi tanah milik negara untuk menjamin keamanan aset negara serta agar tidak ditemukan lagi temuan yang berulang. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Bapak Iskandar (2022) menyampaikan bahwa tertibnya dalam mengelola barang milik negara, meningkatkan kualitas pelaksanaan pekerjaan yang diawasi dan dikendalikan dengan baik merupakan perhatian yang serius bagi kita bersama yang cerminan kinerja dalam pelaksanaan anggaran Kementerian PUPR (Kementerian PUPR, 2022). Hal itu menunjukkan bahwa Kementerian PUPR berkomitmen dalam pengelolaan barang milik negara dan juga untuk menuntaskan temuan-temuan BPK RI terkait Pengelolaan barang milik negara.

Permasalahan pengelolaan barang milik negara juga ditemukan pada Satuan Kerja Kementerian PUPR di Sulawesi Selatan, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Ekka S. Sukadana menjelaskan bahwa terdapat pengelolaan barang milik negara berupa pemanfaatan aset pada sekitar wilayah bendungan bili-bili Provinsi Sulawesi Selatan, dikelola oleh Kementerian PUPR yang digunakan untuk wisata kuliner bili-bili dan PLTA (PT. PLN Persero). Pemanfaatan tersebut dilaksanakan tanpa ada persetujuan dari pengelola barang dan tidak dilandasi oleh perjanjian, sehingga perlu segera dilakukan penataan atas objek tersebut dan menghasilkan pendapatan negara

serta terpenuhinya filosofi pengelolaan barang milik negara yaitu tertib hukum dan tertib fisik serta tertib administrasi (Charles, 2022).

Hasil penelitian sebelumnya juga menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan barang milik negara pada Satuan Kerja Kementerian PUPR di Sulawesi Selatan masih belum maksimal dan terdapat permasalahan yang menghambat pelaksanaan pengelolaan barang milik negara. Rosalina (2023) melakukan penelitian pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan (BBPJJN) Kementerian PUPR dan menyimpulkan bahwa masih banyak barang milik negara pada bagian jalan yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga berpengaruh kepada pendapatan negara. Rachman (2023) mengungkapkan bahwa pengelolaan barang milik negara berupa pemindahtanganan barang milik negara pada BBPJJN Sulawesi Selatan Kementerian PUPR belum sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, ditemukan masih banyak aset barang milik negara yang sudah dalam kondisi rusak berat akan tetapi belum diusulkan untuk dihapuskan sehingga masih membebani neraca dan akan lebih menguntungkan apabila dihapuskan dari pencatatan.

Farhana *et al.*, (2023) berpendapat bahwa Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan Kementerian PUPR dalam melaksanakan pengelolaan barang milik negara berupa penatausahaan belum optimal dan terdapat permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan penatausahaan barang milik negara yang berpotensi untuk merugikan negara diantaranya kesalahan dalam mengaplikasikan SAKTI dan petugas barang milik negara tidak memahami tentang pengelolaan barang milik negara. Yustiana *et al.*, (2023) berpendapat bahwa masih barang milik negara pada BBWS Pompengan Jeneberang Kementerian PUPR yang diperoleh sejak lama dan sudah dalam keadaan rusak berat namun belum dihapuskan, dalam

pelaksanaannya masih terdapat kendala yang menghambat sehingga membutuhkan waktu lebih lama.

Teori Implementasi Kebijakan Publik (Edward III, 1980) menjelaskan bahwa sumber daya, struktur birokrasi, disposisi dan komunikasi merupakan faktor untuk terwujudnya keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Kementerian/Lembaga membutuhkan sumber daya dalam mengelola aset negara secara optimal. Selaras yang diungkapkan oleh Abdelhamid *et al.*, (2015) yang melakukan penelitian tentang manajemen aset strategis untuk gedung Pendidikan di Mesir yang mengemukakan tentang Kerangka Manajemen Aset Strategis dalam pengelolaan aset negara yang terdiri atas tiga mata rantai utama organisasi yaitu manusia, proses dan teknologi yang terintegrasi atau terinformasikan kepada seluruh aspek dalam organisasi.

Rosalina (2023) menyimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat dalam mengelola aset barang milik negara adalah kurangnya SDM yang mendukung dalam pelayanan perizinan pemanfaatan barang milik negara. Rachman (2023) mengatakan bahwa salah satu faktor hambatan terkait proses penghapusan barang milik negara melalui penjualan di BBPJN Sulsel yaitu keterbatasan pengetahuan petugas terkait proses penghapusan barang milik negara. Penelitian oleh Tabita (2021), Rahmadhani & Ariani (2022), Sopaheluwakan<sup>1</sup> *et al.*, (2022), Prihatini *et al.*, (2020), Ricardo *et al.*, (2022) , Prayogia, *et al.*, (2021) menyimpulkan bahwa pengelolaan aset daerah dipengaruhi oleh kualitas aparatur namun Listiani & Agustin (2022) menyimpulkan hasil berbeda yaitu kompetensi SDM tidak terbukti memengaruhi efektivitas pengelolaan aset daerah.

Adapun dasar Pengelolaan terhadap barang milik negara diatur pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 dan PP 27 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah. Diperlukan adanya suatu sistem dalam instansi pemerintah sebagai jaminan bahwa proses pengelolaan terhadap barang milik negara telah sesuai dengan peraturan serta tidak terdapat pelanggaran dan tindakan curang yang dapat muncul dalam proses pengelolaan barang milik negara. Sebagaimana yang dijelaskan dalam PP Nomor 60 tahun 2008 bahwa tujuan sistem pengendalian intern pemerintah salah satunya yaitu pengamanan terhadap aset serta taat terhadap aturan yang berlaku untuk menciptakan keandalan laporan keuangan serta dalam rangka pencapaian apa yang tujuan dari organisasi. Penelitian Imtikhanah & Lukmana (2023) menunjukkan bahwa semakin baik SPI di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, pengelolaan barang milik negara pun semakin baik.

Salah Satu hambatan dalam optimalisasi pemanfaatan barang milik negara pada aset bagian jalan yaitu kurangnya pengawasan pengendalian internal dari Kementerian PUPR (Rosalina, 2023). Yuliana & Taufik (2021) juga berpendapat bahwa diperlukan suatu aturan yang digunakan dalam rangka pengendalian internal dan pedoman bagi para aparatur sehingga tercapainya efektivitas kinerja pengelola aset serta tidak ada lagi permasalahan dalam proses manajemen aset,. Rahmadhani & Ariani (2022), Ricardo *et al.*, (2022), Bria (2019) juga menyimpulkan bahwa pengelolaan BMD dipengaruhi oleh Sistem pengendalian intern Syarbini Ikhsan (2020) penelitiannya dilakukan di perguruan tinggi menghasilkan kesimpulan SPI berpengaruh pada efektivitas manajemen aset tetap. Adapun Berbeda Listiani & Agustin (2022) menghasilkan penelitian yang berbeda yaitu dalam pengelolaan BMD, secara parsial tidak dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat yang menuntut Kementerian/Lembaga untuk beradaptasi secara efektif, perbaikan Sistem Informasi sebagai langkah-langkah untuk penyelesaian permasalahan pada

pengelolaan barang milik negara sebagaimana rekomendasi dari BPK RI. Sekretaris Kementerian PUPR Bapak Zainal Fatah menjelaskan bahwa pada saat ini aset yang harus dikelola semakin banyak sehingga pelaksanaan kegiatan dengan cara-cara konvensional sudah tidak bisa digunakan lagi, perlu dilakukan transformasi digital untuk mengelola barang milik negara, apabila pengelolaan masih menggunakan manual tidak akan ketahuan mengenai penyelesaian target-target yang harus segera dilakukan dan alasan mengapa target tersebut belum bisa diselesaikan secara tepat waktu (Kementerian PUPR, 2022). Pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan tidak hanya sebatas dalam menjadikan data dalam suatu informasi akan tetapi dapat juga digunakan dalam rangka menyebarkan informasi pada pengguna yang dituju, yang berupa informasi keuangan ataupun non keuangan. Penggunaan sistem informasi dalam suatu organisasi bertujuan untuk menghasilkan kreativitas, mempercepat dalam pelaksanaan pekerjaan dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada serta tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan.

Tabita (2021) berpendapat bahwa Sistem informasi merupakan suatu fasilitas dalam mengelola BMD untuk terciptanya pengelolaan BMD yang didasari dengan regulasi dan tertuang dalam laporan BMD. Adapun Penelitian oleh Helmi *et al.*, (2023), Lounggina & Peny *et al.*, (2022), Rahmadhani & Ariani (2022), Aris *et al.*, (2022), Sopaheluwakan *et al.*,(2022), Prihatini *et al.*, (2020) menyimpulkan bahwa pengelolaan barang milik negara dipengaruhi oleh pemanfaatan sistem informasi. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian Ricardo *et al.*, (2022) bahwa pengelolaan BMD tidak berpengaruh secara signifikan oleh pemanfaatan teknologi informasi, Prayoga *et al.*, (2021) bahwa ditemukan belum optimalnya perangkat keras dan perangkat lunak di Sebagian Satker Kota Langsa optimal sehingga hasil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Sistem informasi pada Kota Langsa tidak berpengaruh pada manajemen aset.

Komitmen pimpinan berperan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik negara. Pimpinan yang berkomitmen dalam aspek tersebut, mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pengelolaan barang milik negara yang efektif, efisien dan berlandaskan dengan regulasi yang berlaku. *Puspitarini et al.*, (2017) bahwa peranan komitmen pimpinan sangat penting untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual utamanya pada proses pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara sehingga tercapainya keberhasilan dan kinerja suatu organisasi. Yuliana & Taufik (2021) juga menyimpulkan bahwa variabel SPIP, kualitas aparatur, sistem informasi manajemen dan regulasi dapat dimoderasi oleh komitmen pimpinan terhadap efektivitas manajemen aset tetap. Hasil yang berbeda dengan penelitian oleh c menghasilkan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia tidak dimoderasi oleh komitmen pimpinan terhadap efektivitas pengelolaan BMD akan tetapi pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi mampu dimoderasi oleh komitmen pimpinan terhadap efektivitas pengelolaan BMD.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Tabita (2021), adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu pelaksanaan penelitian tersebut pada Instansi Pemerintah Daerah sedangkan pada penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Pusat yaitu Kementerian PUPR yang belum diteliti sebelumnya, adanya variabel tambahan berupa sistem pengendalian intern serta perbedaan indikator yang digunakan dalam variabel penelitian ini. Penelitian ini meneliti pengelolaan barang milik negara sesuai dengan PMK 207 Tahun 2021 yang merupakan kewajiban Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas barang milik negara yang dikuasainya terdiri atas penggunaan, Pemeliharaan, pemindahtanganan, pemanfaatan, Pengamanan dan Penatausahaan barang milik negara dan yang menjadi permasalahan dalam temuan BPK RI tahun 2022 atas pengelolaan aset tetap.

Berdasarkan fenomena dan uraian tersebut, merupakan ide yang mendasari penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem pengendalian intern dan Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian dapat dikonsepsikan sebagai berikut.

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik negara ?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik negara ?
3. Apakah pemanfaatan Sistem informasi berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik negara ?
4. Apakah komitmen pimpinan dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan barang milik negara ?
5. Apakah komitmen pimpinan dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan barang milik negara ?
6. Apakah komitmen pimpinan dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diidentifikasi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis sebagai berikut.

1. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan barang milik negara
2. Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan barang milik negara
3. Pengaruh pemanfaatan Sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara
4. Pengaruh komitmen pimpinan dapat memoderasi kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan barang milik negara
5. Pengaruh komitmen pimpinan dapat memoderasi sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan barang milik negara
6. Pengaruh komitmen pimpinan dapat memoderasi pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi secara teoritis untuk menambah pemahaman mengenai akuntansi sektor publik di Instansi Pemerintah khususnya Pengelolaan Barang Milik Negara. Kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan sistem informasi dan pengelolaan barang milik negara serta komitmen pimpinan yang menjadi objek kajian dalam penelitian diharapkan menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diinginkan mampu memberikan manfaat praktis bagi Instansi Pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pengelolaan barang milik negara dan mampu mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada proposal penelitian ini mengacu pada Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi (2013) yang terdiri dari 7 bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, yaitu bab yang menguraikan secara singkat latar belakang penelitian yang menjadi pokok pikiran, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka, yaitu bab yang memuat uraian sistematis tentang landasan teori penelitian ini.

Bab III Kerangka konseptual dan hipotesis, yaitu bab yang berisi mengenai kajian teoretis dan empiris mengenai masalah penelitian ini serta pengembangan hipotesisnya.

Bab IV Metode penelitian, bab ini berisikan penjelasan mengenai jenis penelitian, rancangan penelitian, tempat dan lokasi penelitian, serta teknik pengumpulan data dan analisisnya.

Bab V hasil penelitian, bab ini menguraikan deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian. Penyajian hasil penelitian memuat deskripsi tentang data dan temuan penelitian berupa narasi yang disertai analisis statistik, pengujian hipotesis, tabel, grafik, dan gambar.

Bab VI pembahasan, tujuan pembahasan adalah menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan hasil dan temuan pada ilmu atau teori yang telah mapan, memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru.

Bab VII penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran. Bab penutup dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian serupa.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Tinjauan Teori dan Konsep**

**2.1.1. Teori Pertanggungjawaban (*Stewardship Theory*)**

*Stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991) menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara kesuksesan dengan kepuasan organisasi yang mana manajemen tidak lagi memfokuskan diri pada tujuan individu akan tetapi lebih kepada tujuan atau sasaran organisasi. Teori *stewardship* berakar pada model psikologis perilaku manusia, yang mengasumsikan bahwa perilaku manajerial cenderung mendukung organisasi dengan memaksimalkan kepentingan organisasi dari pada tujuan pribadi (Podrug, 2011).

Teori *stewardship* disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan), yang mana manajemen disebut *stewards* yaitu pengelola/penerima amanah/pelayanan untuk mencapai kepentingan organisasi. Pemerintah berperan sebagai steward yang diandalkan untuk bertindak sesuai dengan kepercayaan dan amanah yang diberikan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab dengan baik, hal tersebut bertujuan agar terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat (Listiani & Agustin, 2022). Adapun asumsi dasar teori *stewardship* yang dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 2. 1 Asumsi dasar teori *stewardship***

managers as	<i>stewards</i>
governance approach	<i>sociological and psychological</i>
model of human behaviour	<i>collectivistic, pro-organizational, trustworthy</i>
managers motivated by	<i>principal's objectives</i>
manager's and principal's interests	<i>converge</i>
structures that	<i>facilitate and empower</i>
owners' attitude	<i>risk propensity</i>
principal-manager relationship based on	<i>trust</i>

Sumber : Podrug, N (2011:406)

Manajemen Sebagai *steward* yang diberikan amanah sebagai Pelayan atau pengelola, Pelayanan (*steward*) yaitu orang yang melakukan kebaikan terhadap orang lain artinya seorang *steward* yang baik adalah yang melayani, bukan dilayani (Haliah, 2021). Adapun menurut Morgan (1996) bahwa Ukuran kinerja organisasi pemerintahan adalah bagaimana pelayanannya kepada masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah adalah *steward* yang menerima amanah dengan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan barang milik negara dengan baik dan berdasar pada regulasi yang ada sehingga tidak ada kecurangan, kehilangan aset sehingga mengakibatkan tuntutan hukum dan akan berdampak kepada pelayanan ke Masyarakat.

Teori *stewardship* berdasarkan pada prinsip *governance atas dasar* psikologi dan sosiologi. Hal tersebut untuk menguji lingkungan manajer sebagai *steward* (pelayan) yang termotivasi melaksanakan pada apa yang diinginkan oleh *principal* pada organisasi (J. H. Davis *et al.*, 1997). Haliah (2021) menyebutkan unsur psikologi pada teori *stewardship* salah satunya asumsi komitmen dan juga motivasi, dan unsur sosiologi yaitu prinsip-prinsip filosofis kebudayaan dan manajemen. Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara tidak hanya memperhitungkan aspek ekonomi melainkan juga mempertimbangkan dimensi sosiologis dan psikologis masyarakat dalam rangka mematuhi prinsip-prinsip *good governance*. Ketika aspek tersebut dijalankan dapat menghasilkan pengelolaan barang milik negara yang transparan, efektif dan efisien tentunya dengan dukungan komitmen dari pimpinan untuk menjalankan peran manajemen.

*Model of Man* berperilaku kolaboratif demi kepentingan organisasi dalam teori *stewardship* bersandar pada pelayanan yang berkolaborasi atau bekerja secara bersama-sama untuk siap melayani (Argyris, 1973). Meskipun kepentingan *steward* dan *principal* tidak selalu sejalan, *steward* dalam konteks

organisasi sektor publik tetap memerankan pentingnya nilai kerjasama Haliah (2021). Perilaku *steward* dalam pemerintahan yaitu bersama sama mengarahkan seluruh kemampuannya untuk meningkatkan kinerja atau kualitas pekerjaan.

Motivasi para pemimpin sejalan dengan tujuan utama mereka yaitu kesejahteraan *principal* (Masyarakat), Teori *stewardship* menggambarkan bahwa para pemimpin tidak tergerak oleh kepentingan pribadi melainkan oleh kepentingan organisasi, sehingga *steward* (manajemen) bertindak sesuai dengan kehendak Masyarakat/*principal* yang dilayani. Manajemen paham bahwa dengan perilaku yang sejalan dengan tujuan *principal* dampaknya akan terasa pada pencapaian berdampak kepada tujuan individu/*steward*.

Teori *stewardship* menyatakan bahwa ada konvergensi dalam kepentingan antara manajer dan *principal* yang bermaksud bahwa keduanya fokus pada keselarasan dengan tujuan organisasi. dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik negara diperlukan persamaan persepsi antara manajer dan *principal* untuk menuju satu titik yaitu menghasilkan laporan pengelolaan barang milik negara yang efektif, efisien dan transparan berdasar pada regulasi yang berlaku.

Teori *stewardship* menggunakan struktur yang memfasilitasi dan memberdayakan secara efektif untuk memecahkan permasalahan yang ada pada *principal*. Teori *stewardship* menekankan pada pentingnya memiliki organisasi yang mendukung karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. karyawan cenderung akan lebih termotivasi untuk menemukan solusi dalam permasalahan pekerjaan dan berinovasi lebih baik apabila mendapatkan dukungan dan diberdayakan dari manajemen.

Dalam teori *stewardship* cenderung mempertimbangkan risiko dan merupakan hal yang penting bagi *steward* dan *principal*, dalam sektor publik, seorang *steward* harus berupaya untuk mengurangi risiko sehingga kepentingan Masyarakat/*principal* dapat terpenuhi (Haliah, 2021). Teori *stewardship*

cenderung mempertimbangkan risiko untuk memastikan bahwa Keputusan yang diambil dapat mendukung tujuan organisasi dan tentunya untuk kepentingan Masyarakat.

Hubungan Manajemen dengan *Principal* yang saling percaya dalam teori *stewardship* melihat bahwa manajemen merupakan sebuah entitas yang dipercaya memiliki kemampuan untuk memenuhi kepentingan *principal* maupun organisasi. dalam pelaksanaannya Instansi Pusat bertanggung jawab menjalankan kewajibannya untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dan tercapainya tujuan ekonomi, pelayanan umum dan kesejahteraan terhadap masyarakat.

Implikasi teori *stewardship* pada studi ini membahas peranan Instansi pusat yang menjadi satu kesatuan diandalkan, dipercaya dan bertanggung jawab serta diharapkan mampu menjalankan perannya dengan baik. Artinya, pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang efisien, mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dengan menganggap pemerintah sebagai '*steward*', harapannya adalah pemerintah dapat menjadi pengelola yang dapat dipercaya dan memberikan dampak positif yang optimal bagi masyarakat.

### **2.1.2. Aset**

Aset merupakan bagian penting dalam Laporan Keuangan yang mencerminkan nilai ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh suatu Instansi. Aset memberikan gambaran tentang sumber daya yang dimiliki oleh organisasi serta cara sumber daya tersebut dibiayai. Aset merupakan suatu entitas yang pemilik ekonominya dapat memperoleh manfaat dalam suatu periode akuntansi, aset dapat berwujud atau tidak berwujud, finansial atau non finansial (ISO 55000).

Harrison (2006) dalam Almeida *et al.*, (2022) bahwa "*an asset is an entity from which the economic owner can derive a benefit or series of benefits in future*

*accounting periods by holding or using the entity over a period of time, or from which the economic owner has derived a benefit in past periods and is still receiving a benefit in the current period; Because it represents a stock of future benefits, an asset can be regarded as a store of value”.*

Hal tersebut bermaksud bahwa aset merupakan sesuatu yang memberikan manfaat kepada pemiliknya di masa depan atau telah memberikan manfaat di masa lalu dan masih memberikan manfaat saat ini. Aset juga dianggap sebagai penyimpan nilai karena mewakili potensi manfaat yang akan datang. Dalam akuntansi aset terbagi menjadi aset lancar dan aset tetap. Almeida *et al.*, (2022) menjelaskan bahwa Aset lancar bersifat fleksibel, dana tersebut mudah dicairkan dan tidak dikenakan biaya penyusutan sedangkan aset tetap merupakan aset fisik berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset yang tercatat pada Pemerintah Pusat disebut dengan Barang Milik Negara (BMN). Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Kementerian Keuangan, 2020). Adapun barang milik negara yang dimaksud disini yaitu aset tetap yang dikuasai oleh Kementerian/Lembaga dan digunakan untuk kepentingan publik seperti gedung dan bangunan, tanah, JIJ (jalan, irigasi, dan jaringan), peralatan dan mesin, aset tetap lainnya misalnya bercorak kebudayaan, tanaman ikan dan hewan.

### **2.1.3. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**

Kata pengelolaan sesuai dengan KBBI yaitu cara, perbuatan atau ilmu untuk melakukan kegiatan tertentu termasuk perumusan kebijakan, pengawasan dengan melibatkan tentang semua hal untuk pencapaian tujuan. Dalam hal ini pengelolaan barang milik negara merujuk pada suatu cara atau ilmu untuk menjadikan barang milik negara tertangani dengan baik sehingga terpenuhinya tujuan pemerintah. Kata Pengelolaan dan diterjemahkan menjadi bahasa Inggris

yaitu management dan diartikan bahasa Indonesia menjadi manajemen. Menurut Carnero *et al.*, (2023) bahwa manajemen aset didefinisikan sebagai aktivitas terkoordinasi dalam suatu organisasi untuk mewujudkan nilai dari aset terdiri atas penyeimbang biaya, peluang untuk mendapatkan keuntungan, manajemen risiko untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen aset memiliki dampak yang signifikan pada organisasi, terutama dalam hal produktivitas serta efektivitas biaya, masa manfaat aset, kualitas proses, kepatuhan terhadap standar dan undang-undang dan untuk keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya.

ISO 55000 mendefinisikan manajemen aset merupakan *“coordinated activity of an organization (3.1.13) to realize from aset (3.2.1)”. Realization of value requires the achievement of an appropriate balance of costs, risk and performance, often over different timescales.* Yang berarti bahwa manajemen aset merupakan kegiatan terkoordinasi dalam suatu organisasi untuk mewujudkan nilai dari aset tersebut dengan memperhitungkan antara biaya yang dikeluarkan, risiko yang terkait dan kinerja aset secara bersamaan dan berkelanjutan (GFMAM, 2016). Polenghi *et al.*, (2021) dalam Wang *et al.*, (2023) membagi tiga tahap utama dalam pengelolaan aset yang melibatkan berbagai aktivitas yang harus dilakukan sepanjang umur aset tersebut terdiri atas : (1) *Beginning of Life (BoL)* adalah tahap perencanaan, pembuatan dan pengadaan ke dalam layanan; (2) *Middle of life (MoL)* adalah tahap ketika aset tersebut dalam kondisi penggunaan dan menyediakan layanan yang diinginkan sekaligus memerlukan pengoperasian dan pemeliharaan untuk mempertahankan aset tersebut; dan (3) *End of Life (EoL)* adalah tahap ketika aset tersebut sudah tidak lagi digunakan atau dinonaktifkan dari operasi.

Pelaksanaan Pengelolaan barang milik negara di Indonesia berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Aturan tersebut mengatur proses, langkah-langkah atau kegiatan agar aset negara terkendalikan dengan

baik. mulai dari bagaimana aset tersebut direncanakan, diadakan, digunakan, dimanfaatkan, dipindahtangankan, dinilai, diamankan, dipelihara, ditatausahakan, dimusnahkan, dihapuskan dan dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap aset negara tersebut. Merupakan tanggung jawab kuasa pengguna barang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aset yang berada dalam pengawasannya (Kementerian Keuangan, 2021). Pengawasan dan pengendalian tersebut berupa berupa pemantauan dan penertiban terhadap barang milik negara yang bertujuan untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan dan ketentuan perundang-undangan. Adapun kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagai berikut :

#### **a. Penggunaan**

Satuan Kerja sebagai pengguna barang mempunyai kewajiban untuk mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang dikuasainya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab instansi yang bersangkutan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 tahun 2021 bahwa penggunaan barang milik negara merupakan aktivitas yang dilakukan oleh Pengguna barang sesuai dengan tanggung jawab instansi yang bersangkutan dalam pengelolaan barang milik negara. Penetapan status penggunaan barang milik negara merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum barang milik negara tersebut digunakan dikelola misalnya barang milik negara yang akan dimanfaatkan, dipindahtangankan atau bentuk pengelolaan lainnya maka barang milik negara tersebut harus ditetapkan statusnya terlebih dahulu oleh pengelola barang atau pengguna barang.

#### **b. Pemanfaatan**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 tahun 2021 bahwa Pemanfaatan barang milik negara merupakan pendayagunaan aset negara melalui kegiatan optimalisasi terhadap barang milik negara yang tidak dimanfaatkan dalam

melaksanakan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan tidak merubah status kepemilikannya. Bentuk pemanfaatan barang milik negara berupa pinjam pakai, sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna dan kerja sama penyediaan infrastruktur. barang milik negara yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga dapat dimanfaatkan apabila pelaksanaan Pemanfaatan barang milik negara tersebut tidak mengganggu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, berdasar pada kepentingan negara dan kepentingan umum, tidak melakukan perubahan atas status kepemilikan barang milik negara tersebut dan barang milik negara yang akan dimanfaatkan telah memperoleh penetapan status Penggunaan.

#### **c. Pemindahtanganan**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 tahun 2021 bahwa pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara. Pemindahtanganan dilakukan untuk barang milik negara yang sudah tidak digunakan/tidak diperlukan untuk pelaksanaan tugas pemerintah berupa tukar menukar, hibah, penjualan dan penyertaan modal pemerintah. Seperti contoh barang milik negara berupa peralatan kantor dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka aset tersebut dapat dipindahtangankan melalui penjualan sehingga barang milik negara tersebut tidak membebani laporan keuangan pemerintah.

#### **d. Penatausahaan**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 tahun 2021 bahwa Kegiatan penatausahaan barang milik negara terdiri atas pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara. Farhana (2023) bahwa tujuan dari penatausahaan aset barang milik negara adalah untuk mendukung kelancaran serta kestabilan pada pemerintah dalam pembangunan, selain itu juga agar

terwujudnya akuntabilitas pengelolaan barang milik negara yang sesuai aturan, efektif dan efisien.

pembukuan merupakan proses pendaftaran dan pencatatan terhadap aset barang milik negara tersebut pada Daftar Barang, di mana saat ini instansi pemerintah sudah menggunakan sistem informasi untuk pelaksanaan tersebut. Merupakan kewajiban pengguna barang untuk melaksanakan pembukuan barang milik negara tersebut untuk aset yang dalam penguasaannya sesuai dengan penggolongan dan kodifikasi barang milik negara yang sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan sebagai pengelola barang.

Inventarisasi terdiri atas pendataan, pencatatan dan pelaporan atas Barang Milik Negara tersebut. Pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara dilaksanakan setidaknya satu kali selama lima tahun dan satu kali setahun wajib dilakukan inventarisasi barang milik negara seperti persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan. Satker selaku KPB diharuskan untuk menyusun Laporan barang milik negara yang disampaikan kepada pengelola barang secara semesteran dan tahunan.

#### **e. Pengamanan**

Pengamanan barang milik negara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kondisi fisik dari kehilangan aset atau aset tersebut dikuasai oleh pihak lain tanpa izin sehingga dapat merugikan negara atas kehilangan aset yang dimaksud, meliputi

##### **1) Pengamanan administrasi**

Pengamanan dalam aspek administrasi wajib dilaksanakan dengan cara menghimpun, mencatat dan menyimpan serta menatausahakan dokumen administrasi dengan aman dan dapat dipertanggung jawabkan keberadaan dokumennya.

## 2) Pengamanan Fisik

Pengamanan Fisik dilakukan agar aset barang milik negara tidak mengalami penurunan fungsi, berkurangnya jumlah barang milik negara serta kehilangan barang milik negara itu sendiri.

## 3) Pengamanan Hukum

Pengamanan hukum dilakukan untuk memperkuat status kepemilikan barang milik negara yang dilakukan melalui upaya hukum untuk barang milik negara yang bersengketa dengan pihak lain melalui negosiasi/musyawarah dan penerapan hukum sehingga tuntasnya permasalahan dengan baik.

### **f. Pemeliharaan**

Pemeliharaan dirancang untuk menjaga efektivitas suatu aset dengan menggabungkan semua tindakan teknis, administratif dan manajerial dengan tujuan untuk menjaga atau memulihkannya agar dapat menjalankan fungsi yang diperlukan (Franciosi *et al.*, 2020). Adapun tindakan pemeliharaan yang dijelaskan oleh wang *et al.*, (2023) yang terdiri atas (1). pemeliharaan korektif yaitu pemeliharaan yang hanya dilakukan setelah peralatan berhenti bekerja dan dirancang untuk memulihkan serta mengembalikan fungsinya sebagaimana mestinya; (2). Pemeliharaan preventif yaitu pemeliharaan yang terjadwal dan sudah ditentukan dan; (3) Pemeliharaan prediktif yaitu menggunakan teknik prediktif untuk menentukan jadwal kapan pemeliharaan diperlukan sesuai dengan pemantauan peralatan secara terus menerus.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 tahun 2021 bahwa Kuasa Pengguna Barang melakukan pemantauan terhadap pemeliharaan barang milik negara dengan memastikan bahwa rencana dan pelaksanaan pemeliharaan telah disusun di dalam rencana kebutuhan barang milik negara, kesesuaian pelaksanaan pemeliharaan barang milik negara dengan Daftar Pemeliharaan barang milik negara.

#### **2.1.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor penentu untuk keberhasilan suatu organisasi. Setiap organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga mendukung dalam terlaksananya apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Spencer & Spencer (1993) mendefinisikan bahwa kompetensi merupakan karakteristik dari seorang individu yang berkinerja unggul dalam suatu pekerjaan/situasi. Seseorang dapat dikatakan tidak berkompeten apabila ia dinilai gagal dalam melakukan suatu tugas tertentu yang diwajibkan oleh lingkungannya (Pratama *et al.*, 2015). Kompetensi pegawai bukan hanya tentang kemampuan menyelesaikan pekerjaannya akan tetapi terkait juga dengan perilaku pegawai tersebut dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya seperti yang diungkapkan oleh Martinez bahwa kompetensi tidak hanya kemampuan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan baik akan tetapi juga berfungsi sebagai respon terhadap situasi lingkungan yang tidak bisa dikontrol (Carnero *et al.*, 2023).

Kompetensi menurut Badan Kepegawaian Negara (2008) adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai berupa Pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Menurut Karina *et al.*, (2023) bahwa semakin tinggi tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai, akan semakin tinggi juga kualitas kompetensi sumber daya manusianya. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan pengetahuan pada seseorang yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan dalam untuk memenuhi kebutuhannya. Kompetensi sumber daya manusia bukan hanya mencakup aspek teknis, keterampilan tapi juga sikap serta perilaku.

Porvaznik dalam Skorkova (2016) menyajikan model kompetensi berupa evaluasi kompetensi secara holistik yang terdiri atas tiga pilar dasar penilaian yaitu pengetahuan, keterampilan dan kematangan sosial (perilaku). Dengan menggunakan model tersebut maka organisasi dapat terhindar dari individu yang berkualifikasi rendah sehingga tidak kompeten dalam melaksanakan pekerjaannya.

Badan Kepegawaian Negara (2013) tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan beberapa indikator kompetensi SDM yaitu :

1. Pengetahuan, pada umumnya pengetahuan didapatkan dari pengalaman yang dihadapi oleh individu. Karyawan memiliki pemahaman yang luas dan berkompeten di bidangnya memegang peranan penting dalam menyelesaikan tugas dengan sukses sehingga tercapainya tujuan organisasi.
2. Keterampilan, merujuk pada kemampuan individu untuk mengaplikasikan gagasan dan pengetahuannya untuk menyelesaikan tugasnya dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan.
3. Sikap, responsif seseorang pada pekerjaan dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, bahkan dengan segala resikonya yang merupakan kontribusi positif untuk mendukung kesuksesan pencapaian tujuan perusahaan.

Tabita (2021) menyimpulkan kompetensi sumber daya manusia berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan BMD. Dengan demikian, peningkatan kapasitas SDM dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan barang milik negara. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor krusial dan dapat memengaruhi kinerja pegawai dalam instansi pemerintah maupun swasta. pegawai penting untuk mempunyai pengetahuan memadai,

keterampilan khusus serta sikap terpuji untuk dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Perubahan yang sangat cepat saat ini di dunia ekonomi, teknologi, dan sosial, mengharuskan SDM mempunyai kompetensi yang bukan lagi menyelesaikan pekerjaannya akan tetapi yang juga memiliki perilaku dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. Hal tersebut sangat relevan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki posisi pimpinan dan manajemen dan merupakan bagian penting dalam organisasi, karena kemampuan organisasi untuk berkembang dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks sangat ditentukan oleh kemampuan pada manajernya (Carnero *et al.*, 2023).

#### **2.1.5. Sistem pengendalian intern**

Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah untuk mewujudkan *good governance* sehingga pengendalian internal sangat penting dan merupakan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 yaitu Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk menjamin keamanan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, melindungi aset negara, dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan (Presiden Republik Indonesia, 2008).

Menurut Mahmudi (2011:20), terdapat 6 tujuan diperlukannya SPI yaitu (1) perlindungan terhadap aset dan data negara; (2) pemeliharaan pencatatan yang akurat dan terperinci; (3) laporan keuangan yang andal, akurat dan relevan; (4) memberikan jaminan penyusunan laporan keuangan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku/Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP; (5) operasi yang efisiensi dan efektivitas; dan (6) memberikan jaminan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan dan kebijakan manajemen. Unsur-unsur sistem pengendalian intern dalam pemerintah berpedoman kepada sistem pengendalian intern yang diterapkan di berbagai negara yaitu mengacu pada kerangka kerja dan panduan yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)* yang terdiri atas lima organisasi dan audit global terdiri atas *The Institute of Internal Auditors (IIA)*, *Association of International Certified Public Accountants (AICPA)*; *Financial Executives International (FEI)*; *American Accounting Association (AAA)*; and *Institute of Management Accountants* dan didirikan pada tahun 1985 untuk menanggapi berbagai kekhawatiran mengenai kualitas laporan keuangan (COSO, 2024).

Pengendalian internal menurut COSO adalah merupakan suatu proses yang integral pada suatu kegiatan yang dilakukan oleh unsur pimpinan dan seluruh pegawai dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya suatu tujuan organisasi. adapun unsur-unsur pengendalian internal sebagai berikut :

#### 1. Lingkungan pengendalian

Pengendalian internal pemerintah sangat dipengaruhi oleh Lingkungan pengendaliannya. Keadaan yang baik pada lingkungan pengendalian akan memberikan dampak positif pada aktivitas organisasi dan sebaliknya apabila lingkungan tidak kondusif menjadi indikasi ketidaksehatan organisasi tersebut. Adapun unsur lingkungan pengendalian terdiri atas penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan SDM, perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif, hubungan kerja yang baik.

## 2. Penilaian risiko

Penilaian risiko merupakan aktivitas entitas mengidentifikasi dan mengelola risiko sehingga dapat mengantisipasi kejadian yang berpotensi menjadi ancaman yang dapat menghalangi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Proses ini melibatkan langka-langkah kegiatan identifikasi, analisis dan mengelola risiko yang relevan bagi proses atau kegiatan organisasi terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

## 3. Kegiatan pengendalian

Merupakan upaya yang dilakukan dalam mengelola risiko, melibatkan penetapan dan implementasi kebijakan serta prosedur. Yang bertujuan untuk memastikan apakah tindakan pengelolaan risiko dilaksanakan secara efektif, seperti evaluasi atas kinerja instansi, pembinaan SDM, pemisahan fungsi, pengendalian fisik aset, dan lainnya.

## 4. Informasi dan komunikasi

Penting untuk mengkomunikasikan Informasi pada organisasi agar semua pihak mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya. Maka dari itu diperlukan sistem informasi yang mendukung manajemen dalam mengelola dan mengendalikan operasionalnya. Pentingnya hasil dari informasi dan komunikasi tersebut memberikan dampak yang signifikan kepada kemampuan organisasi dalam menghasilkan suatu Keputusan yang cepat dan tepat dalam pelaksanaan kegiatan entitasnya.

## 5. Pemantauan

Pemantauan merujuk pada proses evaluasi yang menilai kualitas dari sistem pengendalian intern. Pemantauan dengan secara berkelanjutan dan dengan tindak lanjut rekomendasi hasil audit. Penegakan sistem pengendalian intern mempunyai peranan sangat vital sebagai pondasi dalam melaksanakan manajemen dalam suatu organisasi. Proses pengendalian diintegrasikan ke

dalam tindakan dan aktivitas oleh manajemen dan seluruh karyawan untuk membentuk lingkungan pengendalian yang optimal guna mencapai tujuan organisasi. Dengan keberadaan sistem pengendalian intern yang dapat diandalkan, maka terwujudnya organisasi yang transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

#### **2.1.6. Pemanfaatan Sistem Informasi**

Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis dalam Jogiyanto (2005) bahwa sistem informasi merupakan sistem di dalam organisasi yang menghubungkan kebutuhan pemrosesan transaksi sehari-hari yang mendukung fungsi operasional manajerial organisasi dengan aktivitas strategis organisasi untuk memberikan laporan yang dibutuhkan kepada pihak eksternal. Sistem informasi tidak hanya berperan sebagai infrastruktur teknologi, akan tetapi juga merupakan elemen integral dalam mendukung operasi, manajemen dan strategi organisasi secara keseluruhan.

F. D. Davis (1993) memperkenalkan Model penerimaan teknologi (*The technology acceptance model/TAM*) yang merupakan salah satu model/kerangka kerja yang digunakan untuk memahami unsur-unsur yang berkaitan dengan diterimanya penggunaan suatu sistem informasi oleh penggunanya. Model tersebut adalah adaptasi dari *theory of reasoned action (TRA)* oleh Ajzen dan Fisbein (1980). Scherer et al., (2019) variabel inti *TAM* terdiri atas motivasi pengguna (persepsi kegunaan/kebermanfaatan, kemudahan penggunaan serta sikap terhadap teknologi) dan variabel hasil (berperilaku dan penggunaan teknologi) namun persepsi kegunaan/manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan adalah variabel kunci keberhasilan dalam pemanfaatan teknologi.

*Perceived usefulness* (kegunaan/kebermanfaatan) adalah seberapa yakin individu bahwa dengan menggunakan sistem tertentu, kinerjanya akan

meningkat sedangkan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan) adalah seberapa yakin individu bahwa menggunakan suatu sistem akan membebaskan mereka dari usaha yang berlebihan (Edo *et al.*, 2023). Instansi pemerintah perlu menggunakan atau mengembangkan sistem informasi yang andal untuk sarana dalam menghasilkan laporan pertanggung jawaban dalam rangka melaksanakan pengelolaan barang milik negara secara efektif dan efisien dan transparan dan juga sistem informasi juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Pemanfaatan informasi teknologi juga dapat digunakan untuk memudahkan dalam pengelolaan barang milik negara, sehingga sistem yang ada dapat memberikan informasi yang andal sehingga informasi yang dihasilkan dari aplikasi tersebut sesuai dengan yang di lapangan dan dapat dipercaya keakuratannya.

Siregar (2024) bahwa dalam rangka tercapainya tujuan manajemen aset yang terintegrasi, berencana dan andal dalam menyajikan informasi/data yang cepat, maka dibutuhkan sistem informasi untuk pengambilan keputusan yang memainkan peran penting sebagai sarana dalam peningkatan kinerja, memastikan transparansi dalam pengelolaan aset dan tidak ada kekhawatiran terhadap lemahnya pengawasan dan pengendalian (Gafar, 2018)

Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang mengembangkan aplikasi yang berbasis teknologi dan informasi yang dapat diaplikasikan dan diakses baik oleh pengguna barang maupun pengelola barang disebut dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara/SIMAN, aplikasi tersebut digunakan oleh Satuan Kerja pada Instansi pusat dalam mengelola barang milik negara, dan juga aplikasi tersebut terintegrasi dengan aplikasi Keuangan Tingkat Instansi/SAKTI yang memfasilitasi semua proses dalam keuangan negara mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. Penggunaan sistem informasi tersebut dapat memberikan kemudahan kepada penggunanya dalam hal ini

kepada aparaturnya yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola barang milik negara sehingga pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan efektif dan efisien.

Pemanfaatan/penggunaan sistem informasi menurut Davis (Dalam Jogiyanto dan Abdillah, 2011) yaitu mengenai kebermanfaatan (*perceived of usefulness*) dengan 6 (enam) indikatornya terdiri dari : mempercepat pekerjaan, meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, efektivitas, mempermudah pekerjaan dan bermanfaat, dan mengenai kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dengan 6 (enam) indikator yaitu : mudah dipelajari, dapat dikontrol, jelas dan dapat dipahami, fleksibel, mudah untuk menjadi terampil/mahir serta mudah digunakan (Gafar, 2018).

#### **2.1.7. Komitmen Pimpinan**

Komitmen merupakan kemampuan dan keinginan seseorang dalam menyelaraskan perilaku pribadi dengan kepentingan organisasi dan mengutamakan kebutuhan organisasi dari pada kebutuhan pribadi (Soekidjan,2009). Memerlukan seorang pemimpin yang berkomitmen untuk mencapai keberhasilan organisasi. pada intinya, seorang Pemimpin adalah individu yang memiliki komitmen dan kapasitas dalam mempengaruhi perilaku orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan dalam organisasi. Menurut Hasibuan (2011) pemimpin merupakan seseorang yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Wahyusumodjo (1994:87) bahwa komitmen pimpinan merupakan sikap atau janji seorang pemimpin untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Seorang pemimpin diharuskan untuk memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi contoh atau standar bawahannya dan merupakan motor penggerak dalam keberhasilan kinerja suatu organisasi. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus

memiliki sifat *Ing ngarsa sung tulada* (di muka memberi contoh), *Ing madya mangun karsa* (di tengah membangun cita-cita) dan *tut wuri handayani* (mengikuti dan mendukungnya) (R. Tjahjopurnomo, 2017).

Allen & Meyer (1990) bahwa komitmen dalam organisasi merupakan suatu konsep yang terdiri atas tiga dimensi yaitu Komitmen afektif, komitmen normatif dan komitmen berkelanjutan. komitmen afektif yaitu menyangkut merujuk pada hubungan/ikatan emosional individu kepada organisasi tempatnya bekerja, komitmen normatif yaitu sebagai dimensi moral, berdasarkan pada kewajiban dan tanggung jawab yang dirasakan pada organisasi tempatnya bekerja, komitmen berkelanjutan sebagai persepsi atau risiko yang ditimbulkan ketika meninggalkan organisasinya, individu dapat mengalami hal yang berbeda-beda, oleh karenanya unsur-unsur tersebut dapat mempengaruhi perilaku walaupun hasilnya akan berbeda (Ly, 2024).

Ismail (2022) menyebutkan indikator pengukuran Komitmen Pimpinan terdiri atas (1) komitmen afektif yaitu pemimpin yang dapat berkomunikasi dengan baik, dapat diandalkan, dapat mengendalikan perasaannya, dan memiliki motivasi yang tinggi; (2) komitmen normatif yaitu pimpinan yang loyal terhadap organisasi, memiliki sikap dan tanggung jawab yang tinggi dan (3) komitmen berkelanjutan yaitu pimpinan yang memformulasikan kebijakan yang menguntungkan organisasi dan mengefisienkan biaya terkait.

## **2.2. Telaah Riset terdahulu**

Adapun beberapa studi terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu :

Rosalina (2023), penelitiannya dilakukan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Kementerian PUPR dengan metode penelitian kualitatif dan menyimpulkan bahwa masih banyak barang milik negara pada

belum dimanfaatkan secara optimal sehingga berpengaruh kepada pendapatan negara. Adanya kendala-kendala yang dihadapi BBPJN dalam proses pemanfaatan barang milik negara diantaranya perbedaan terbatasnya sumber daya manusia untuk pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian internal belum maksimal, regulasi dan faktor Informasi dan Komunikasi serta faktor ekonomi.

Rachman (2023) melakukan penelitian secara kualitatif tentang pengelolaan barang milik negara berupa penghapusan barang milik negara melalui penjualan dalam pengelolaan aset, menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan barang milik negara pada BBPJN Sulawesi Selatan belum sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 disebutkan beberapa kendala dalam pelaksanaannya diantaranya yaitu terbatasnya pengetahuan yang dimiliki oleh petugas barang milik negara, data barang milik negara pada aplikasi tidak terupdate, dan permasalahan lainnya dengan memaksimalkan sumber daya serta adanya komitmen yang kuat oleh pemimpin, maka proses tersebut akan lebih optimal.

Farhana *et al.*, (2023) dilakukan dengan metode kualitatif pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan dan menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan barang milik negara berupa penatausahaan barang milik negara belum optimal. Pelaksanaan inventarisasi dan pembukuan serta pelaporan barang milik negara menggunakan aplikasi SAKTI namun masih terdapat kendala yang menghambat proses pelaksanaannya yaitu kesalahan dalam penginputan oleh operator aplikasi SAKTI serta masih kurangnya koordinasi antara staf teknis dan staf barang milik negara.

Yustiana *et al.*, (2023) melaksanakan penelitian dengan kualitatif pada proses pengelolaan barang milik negara berupa pemindahtanganan dan

penghapusan barang milik negara berupa peralatan kantor pada BBWS Pompengan Jeneberang dan menyimpulkan bahwa barang milik negara yang diusulkan untuk dihapuskan adalah barang milik negara dalam keadaan rusak berat yang diperoleh sejak lama dan dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang menghambat sehingga membutuhkan waktu lebih lama diantaranya adanya proses migrasi dari SIMAK ke SAKTI sehingga adanya data yang berbeda, data yang tidak sama antara lapangan dengan aplikasi SIMAN BMN serta masih kurangnya petugas barang milik negara yang mengerti prosedur pengelolaan barang milik negara pada Satker Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.

Tabita (2021) melakukan penelitian dengan Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai variabel dependen, sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan kualitas sistem informasi adalah variabel independen. Adapun komitmen pimpinan merupakan variabel moderasi Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh dan kualitas sistem informasi dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan BMD sedangkan komitmen pimpinan dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan barang milik daerah, akan tetapi komitmen pimpinan tidak memoderasi kualitas sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik daerah.

## BAB III

### RERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

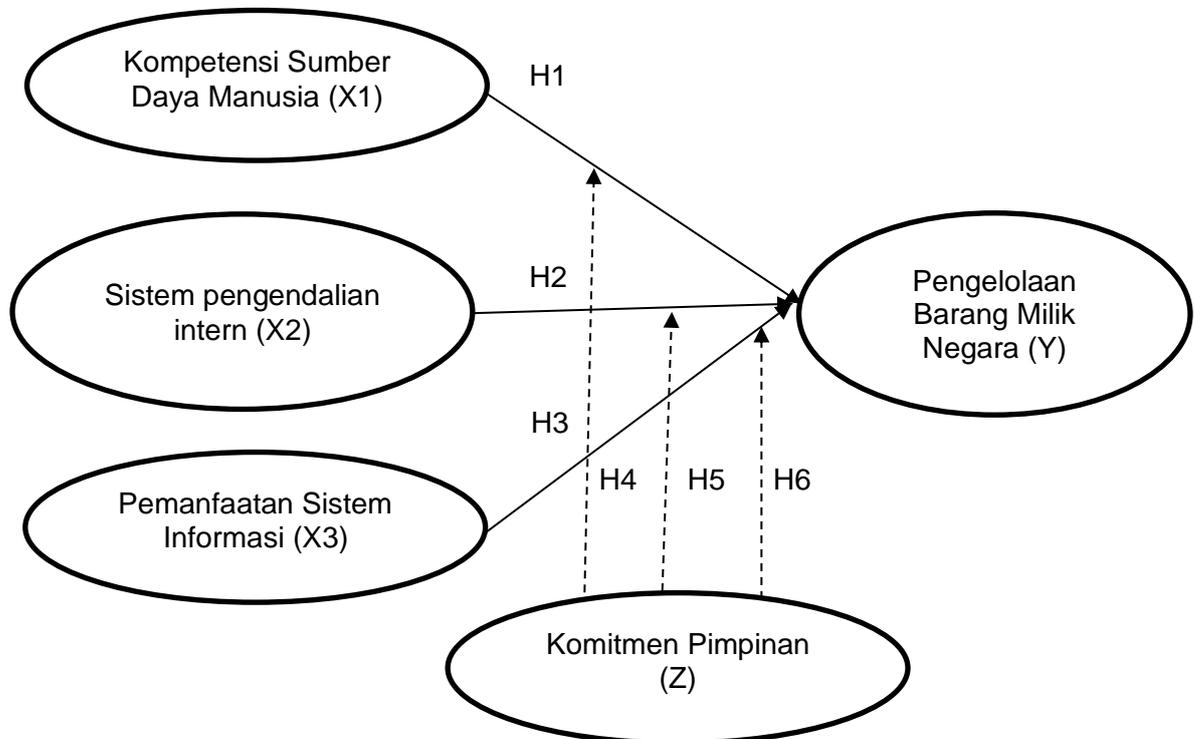
#### 3.1. Rerangka Konseptual

Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan adanya rerangka kerja sehingga penelitian tersebut terarah, lebih tepat dan lebih relevan dalam pengolahan data dan menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun tujuan Kerangka konseptual yang dikembangkan yaitu untuk menyajikan gambaran keseluruhan penelitian. Penelitian ini menganalisis Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem pengendalian intern, Pemanfaatan Sistem Informasi dan Komitmen Pimpinan sebagai pemoderasi terhadap pengelolaan barang milik negara.

barang milik negara memiliki peran dan fungsi strategis dalam upaya meningkatkan fungsi efektivitas pelayanan publik. Dengan optimalnya pengelolaan barang milik negara dapat memberikan potensi meningkatkan pendapatan bagi negara, namun akan menjadikan beban negara hal tersebut tidak dilakukan karena barang milik negara membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi. *Stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991) bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara kepuasan dan kesuksesan suatu organisasi. Hal yang pokok dalam teori ini bahwa sasaran utama para manajemen yaitu untuk kepentingan organisasi dan mereka tidak memfokuskan diri pada kepentingan pribadi. Sumber daya manusia yang kompeten, efektifnya pengendalian internal dan pemanfaatan sistem informasi yang baik dengan dorongan komitmen pimpinan sehingga menghasilkan pengelolaan aset negara yang efektif dan efisien dengan tetap berdasar pada asas-asas pengelolaan barang milik negara.

Adapun variabel independen pada penelitian ini yaitu kompetensi SDM, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan sistem informasi, variabel

dependen yaitu pengelolaan barang milik negara dan komitmen pimpinan sebagai moderasi, dapat dijelaskan dalam rerangka konseptual pada gambar 3.1



**Gambar 3. 1 Rerangka Konseptual**

### 3.2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis, temuan dari penelitian sebelumnya serta kerangka pemikiran tentang variabel penentu dalam pengelolaan barang milik negara dengan komitmen pimpinan sebagai pemoderasi pada satuan kerja kementerian PUPR di wilayah Sulawesi Selatan, dengan berdasar pada hal tersebut, perumusan hipotesis penelitian sebagai berikut.

#### 3.2.1. Kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan barang milik negara

Sumber daya manusia merupakan bagian utama keberhasilan instansi. Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penentu apakah instansi pemerintah tersebut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat pada

umumnya dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara akan berjalan dengan baik apabila ditangani oleh aparaturnya yang berkualitas. Teori *stewardship* menggambarkan bahwa manajemen sebagai *steward* yang menerima amanah untuk melaksanakan kegiatan organisasi dengan penuh tanggung jawab, oleh sebab itu dalam bertindak sebagai *steward* memerlukan kompetensi sumber daya manusia sehingga pelayanan publik berjalan dengan baik.

Kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki agar mampu menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, terdiri atas pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai (Gafar, 2018). Dalam penelitian Tabita (2021) menyimpulkan bahwa kompetensi aparaturnya berpengaruh terhadap pengelolaan aset daerah, penelitian oleh Rahmadhani dan Ariani (Prayogia et al., 2021; Prihatini et al., 2020; Rahmadhani & Ariani, 2022; Ricardo et al., 2022) menyatakan hal yang sama. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesisnya adalah:

**H1 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan barang milik negara**

### **3.2.2. Sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan barang milik negara**

Untuk terciptanya pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan sehingga terealisasinya keluaran yang memberikan manfaat secara luas, perlu adanya sistem yang digunakan untuk pengendalian internal berguna untuk mengawasi dan mengelola seluruh kegiatan yang dirancang untuk memberikan kepastian apakah aktivitas tersebut berlangsung dengan pedoman yang ada serta pencapaian tujuan dari organisasi terkait. Sistem tersebut yaitu Sistem pengendalian intern Pemerintah sebagaimana dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian intern Pemerintah dengan mengacu

pada *The Committee of Sponsoring Organization on the Treadway Commission (COSO)*.

Teori *stewardship* menggambarkan bahwa manajerial organisasi bertindak sebagai manajer (*steward*) dengan penuh kesadaran, memiliki tanggung jawab dan dengan bijaksana demi kebaikan organisasi dan tidak termotivasi dengan tujuan organisasi untuk memperoleh kepercayaan publik (Donaldson & Davis, 1991). Dalam mengelola barang milik negara diperlukan adanya sistem pengendalian bertujuan untuk mengontrol pelaksanaan sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan mengikuti peraturan yang sesuai dan kemudian tidak ditemukan lagi adanya temuan/permasalahan yang berulang dalam pengelolaannya.

Yuliana & Taufik (2021) juga mengatakan bahwa agar kinerja pengelola aset lebih optimal dan juga untuk mencegah kemungkinan hambatan maka dibutuhkan peraturan yang jelas dalam mengontrol dan memberi arahan dalam menjalankan tugas aparatur. Dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengendalian internal adalah salah satu penentu yang memengaruhi manajemen aset, itu menandakan bahwa sistem pengendalian intern telah diterapkan sebaik-baiknya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesisnya yaitu :

**H2 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pengelolaan barang milik negara**

### **3.2.3. Pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara**

Sistem informasi yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang akurat, memungkinkan pengguna informasi untuk dengan mudah memahami tentang informasi yang telah disajikan. dikaitkan dengan teori *stewardship*, Pemerintah adalah *steward* dengan memfasilitasi dan memberdayakan untuk pelaksanaan pelayanan publik dengan didukung oleh fasilitas yang digunakan

sebagai aktivitas penyelesaian suatu permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kewajiban untuk mencapai tujuan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan.

Pemanfaatan sistem informasi seperti aplikasi SIMAN digunakan untuk memudahkan dalam mengelola barang milik negara menjadikan pekerjaan lebih cepat dan akurat. Tabita (2021) mengemukakan bahwa semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi maka akan menjadikan pengelolaan aset negara yang efektif dalam sebuah organisasi dan menyimpulkan hasil penelitian bahwa pemanfaatan sistem informasi dapat memengaruhi pengelolaan aset daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesisnya yaitu :

**H3 : Pemanfaatan sistem informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan barang milik negara**

#### **3.2.4. Komitmen pimpinan memoderasi kompetensi sumber daya manusia, informasi terhadap pengelolaan barang milik negara**

Teori stewardship menggambarkan situasi bahwa pimpinan tidak termotivasi dengan tujuan individu akan tetapi lebih mementingkan kepentingan organisasi. Komitmen pimpinan mempunyai peranan penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Pimpinan yang berkomitmen mengarahkan bawahannya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi sehingga pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab dapat selesai tepat waktu dan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. dengan adanya komitmen pimpinan terhadap kompetensi SDM dalam mengelola barang milik negara dapat mendorong atau memberikan dukungan ke petugas barang milik negara agar lebih berkompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai petugas barang milik negara.

Hasil penelitian Yuliana & Taufik, 2021 (2021) menyimpulkan bahwa kualitas aparatur dimoderasi oleh komitmen pimpinan dalam mendukung efektivitas manajemen aset tetap daerah, sehingga pimpinan harus berkomitmen

untuk menciptakan SDM yang andal sehingga pengurus barang bekerja untuk menjalankan visi dan misi organisasi salah satunya dengan memfasilitasi petugas barang milik negara untuk menambah pengetahuan dengan cara mengikutkan dalam kegiatan Pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang milik negara. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesisnya yaitu :

**H4 : Komitmen pimpinan memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan barang milik negara**

**3.2.5. Komitmen pimpinan memoderasi sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan barang milik negara**

Sistem pengendalian intern merupakan pondasi penting dalam mencegah dan mendeteksi tindakan penggelapan (*fraud*), sekaligus membimbing serta memberikan pengawasan terhadap sumber daya yang ada pada organisasi. Keandalan sistem pengendalian intern berdampak terhadap hasil dari pengelolaan barang milik negara. Dalam perjalanannya, pimpinan instansi diamanatkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian sehingga terbentuknya lingkungan yang kondusif dalam menerapkan sistem pengendalian intern di organisasinya. maka dari itu dibutuhkan komitmen pimpinan yang kuat agar unsur-unsur sistem pengendalian intern berjalan dengan baik untuk mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan barang milik negara. Bodnar and Hopwood (2003:215) bahwa tanggung jawab utama untuk berjalannya pengendalian internal ada pada manajemen/pimpinan. COSO (2009:49) mengistilahkan tanggung jawab tersebut sebagai : *tone of the top* – keteladanan dari atas/pimpinan (Haliah, 2021). Ketika pimpinan berkomitmen untuk menerapkan sistem pengendalian intern maka akan mendorong bawahan yang terlibat untuk berbuat yang sama sehingga terciptanya nilai tambah dalam pengelolaan aset negara.

Dalam teori *stewardship* diungkapkan bahwa manajemen atau pemerintah dalam penelitian ini sebagai *stewards* yang diberikan amanah dan bertanggung jawab untuk mengelola, menjaga dan meningkatkan aset negara yang dikuasainya. Komitmen pimpinan yang memoderasi sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan barang milik negara mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab pemerintah sebagai pengelola aset negara. Dengan mengimplementasikan pengendalian yang efektif dan transparan, pemimpin mendemonstrasikan komitmen mereka untuk mengelola aset dengan baik, menjaga integritas, dan meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip *stewardship* yang menekankan pengelolaan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan umum, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana & Taufik, 2021 (2021) menyimpulkan pengaruh sistem pengendalian intern diperkuat oleh komitmen pimpinan terhadap efektivitas pengelolaan aset pada Kabupaten Bengkalis. Dengan diterapkannya SPI maka pimpinan mempunyai kewajiban untuk mengarahkan dan mengawasi bawahan dalam mengelola aset, maka penerapan komitmen pimpinan yang konsisten secara positif akan meningkatkan peran SPI dalam meningkatkan efektivitas manajemen aset tetap. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesisnya yaitu :

**H5 : Komitmen pimpinan memoderasi pengaruh Sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan barang milik negara**

### **3.2.6. Komitmen pimpinan memoderasi pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara**

Zada *et al.*, (2023) bahwa pemimpin yang efektif mempunyai tanggung jawab untuk membimbing dan memotivasi bawahannya, menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas serta mengelola sumber daya untuk memastikan bahwa

pelaksanaan kegiatan selesai tepat waktu dan sesuai anggaran yang tersedia. Tummers dan Knies (2016) bahwa kepemimpinan publik mendorong anggota tim untuk bersikap transparan dan jujur tentang tindakan mereka dan organisasi mereka dan memastikan anggota tim mereka mematuhi hukum, peraturan, dan prosedur yang berlaku.

Dengan memanfaatkan sistem informasi memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga menghasilkan pekerjaan yang memberikan informasi yang memadai, andal dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, dibutuhkan pimpinan yang berkomitmen untuk mengelola sumber daya tersebut yang memberikan dukungan kepada bawahannya agar pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara tepat dan cepat melalui pemanfaatan teknologi tersebut. Teori *stewardship* mengarahkan pemimpin untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan barang milik negara yaitu memastikan efisiensi, transparansi, dan keamanan sistem informasi guna meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara yang efektif.

Salah satu aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik negara yaitu aplikasi SIMAN yang memberikan informasi aset mengenai jumlah, nilai, keberadaan, potensi, kondisi aset negara dan aplikasi tersebut sudah terintegrasi ke aplikasi pengelola barang maupun pengguna barang. Tabita (2021) menyimpulkan bahwa dengan tingginya komitmen pimpinan dalam mendukung kualitas sistem informasi, maka efektivitas pengelolaan BMD dapat ditingkatkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesisnya yaitu :

**H6 : Komitmen pimpinan memoderasi pengaruh pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik Negara.**

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **4.1. Rancangan Penelitian**

Adapun tujuan dari Penelitian yaitu menjelaskan hubungan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern serta pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan aset barang milik negara dengan komitmen pimpinan sebagai pemoderasi, dengan pendekatan kuantitatif dan metode penelitian survei dengan membuat daftar pertanyaan (kuesioner) kemudian disebar dan diisi oleh pejabat dan staf yang mengelola barang milik negara serta operator yang mengetahui tentang pengelolaan barang milik negara. survey merupakan metode yang digunakan untuk menghimpun data dari individu-individu dengan tujuan untuk menggambarkan, membandingkan, atau menjelaskan pengetahuan, sikap dan perilaku mereka (Sekaran & Bougie, 2009). Penelitian survei melibatkan pengumpulan data dari sampel yang diambil dari populasi baik besar maupun kecil, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar faktor-faktor sosiologis dan psikologis (Kerlinger, 1973).

#### **4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun Penelitian ini di Satuan Kerja Kementerian PUPR yang berlokasi di Sulawesi Selatan. Adapun waktu penyelesaian penelitian yaitu sekitar dua bulan.

#### **4.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi merujuk pada kumpulan atau objek yang memiliki karakteristik/sifat tertentu yang menjadi subjek penelitian, sedangkan sampel merupakan bagian yang diambil dari populasi tersebut untuk mewakili

karakteristik tersebut dalam analisis lebih lanjut (Sugiyono, 2016). Populasi dan sampel yang dianalisis yaitu sejumlah 63 (enam puluh tiga) orang terdiri atas pejabat dan petugas/pegawai yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang pengelolaan barang milik negara pada Satuan Kerja Kementerian PUPR yang berlokasi di Sulawesi Selatan terdiri atas 21 (dua puluh satu) Satker yang merupakan sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik pemilihan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel Nonprobability sampling yaitu *purposive sampling* adalah metode menentukan sampel dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu (Sugiyono, 2016). Pemilihan sampel penelitian ini yaitu pejabat dan pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola barang milik negara sebanyak 21 (dua puluh satu) Satuan Kerja Kementerian PUPR di Wilayah Sulawesi Selatan terdiri atas Pejabat Pengguna Barang, Petugas/pengurus barang milik negara dan Operator Aplikasi SAKTI dan SIMAN.

**Tabel 4. 1 Populasi dan Sampel**

No	Satker	Populasi Pejabat dan Petugas BMN	Sampel
1.	SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum	3	3
2.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	3	3
3.	Satker Perencanaan Pengawasan Jalan Nasional	3	3
4.	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III	3	3
5.	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I	3	3
6.	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II	3	3
7.	Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3	3
8.	Satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah	3	3
9.	Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wil. I	3	3
10.	Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wil.II	3	3

No	Satker	Populasi Pejabat dan Petugas BMN	Sampel
11.	Satker OP SDA Pompengan Jeneberang	3	3
12.	SNVT Pembangunan Bendungan BBWS-PJ	3	3
13.	SNVT PJSA Pompengan Jeneberang	3	3
14.	SNVT PJPA Pompengan Jeneberang	3	3
15.	SNVT Air Tanah Dan Air Baku	3	3
16.	Satker BBWS Pompengan Jeneberang	3	3
17.	Satker Penyediaan Perumahan	3	3
18.	Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wil. Sulawesi III	3	3
19.	BAPEKOM PUPR Wilayah VIII	3	3
20.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi	3	3
21.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar	3	3
	<b>Jumlah</b>	<b>63</b>	

#### 4.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif (Sugiyono, 2016). Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

Data Primer merupakan informasi yang didapat langsung (tangan pertama) mengenai variabel pada penelitian guna mencapai hasil dari penelitian (Sekaran & Bougie, 2009). Penelitian ini mengumpulkan data primer dengan kuesioner berbentuk *google form* yang diberikan ke responden melalui aplikasi *whatsapp*. Sedangkan Data Sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan sumber yang ada (Sekaran & Bougie, 2009). Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang digunakan untuk sebagai pendukung dalam pengumpulan data primer oleh peneliti.

#### 4.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan wawancara, kuesioner, observasi dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2016). Untuk mendapatkan hasil penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada Pejabat Pengguna Barang, Petugas/pengurus barang milik

negara dan Operator Aplikasi SIMAN. Kuesioner dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan untuk responden baik langsung atau pos maupun internet (Sugiyono, 2016).

Instrumen kuesioner disusun ke dalam skala *likert*, yang digunakan untuk mengevaluasi pendapat, sikap dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial. Fenomena tersebut didefinisikan dengan jelas sebagai variabel penelitian. Kemudian Variabel ini diuraikan menjadi indikator-indikator, yang menjadi dasar untuk merancang item-item instrumen berupa pertanyaan/ Pernyataan (Sugiyono, 2016). Adapun skala dengan pertanyaan/ pernyataan pada skala lima (5) titik/poin. Jawaban yang digunakan untuk setiap pertanyaan adalah skor satu (1) apabila dijawab sangat tidak setuju (STS), skor dua (2) apabila dijawab tidak setuju (TS), skor tiga (3) apabila dijawab netral (N), skor empat (4) apabila dijawab setuju (S), dan skor lima (5) apabila dijawab sangat setuju (SS).

#### **4.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

##### **4.6.1. Variabel Penelitian**

Menurut (Sugiyono, 2016) Variabel penelitian merupakan segala aspek yang dapat berbentuk apapun yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan mendapatkan suatu informasi atau data kemudian menghasilkan kesimpulan dari informasi yang sudah dikumpulkan, variabel pada penelitian ini terdiri atas :

##### **1. Variabel Bebas (Variabel Independen)**

Variabel Bebas (Independen) adalah faktor atau kondisi yang diduga memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Variabel bebas pada penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Sistem pengendalian intern (X2) dan Pemanfaatan Sistem Informasi (X3).

## 2. Variabel Dependen (terikat)

Variabel Dependen (terikat) adalah faktor yang dipengaruhi atau menjadi hasil dengan adanya variabel independen (bebas). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Barang Milik Negara (Y).

## 3. Variabel Moderasi

Variabel moderasi merupakan variabel yang mempengaruhi kekuatan atau kelemahan hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel moderasi pada penelitian ini adalah Komitmen Pimpinan.

### 4.6.2. Definisi Operasional Variabel

**Tabel 4. 2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran
1	Pengelolaan Barang Milik Negara (Y)	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan suatu rangkaian proses/ tindakan terhadap barang milik negara yang diawasi dan dikendalikan berdasarkan aturan yang berlaku.	1. Penggunaan 2. Pemanfaatan 3. Pemindahtanganan 4. Penatausahaan 5. Pengamanan 6. Pemeliharaan Sumber : <i>PMK Nomor 207 tahun 2021</i>
2	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	Kompetensi SDM adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai berupa Pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien	1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Sikap/perilaku  <i>Sumber : Perka BKN No. 11 Tahun 2008</i>
3	Sistem Pengendalian Internal	Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk menjamin keamanan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, melindungi aset negara, dan mematuhi hukum dan peraturan.	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan  <i>Sumber : COSO, PP 60 Tahun 2008</i>

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran
4	Pemanfaatan Sistem Informasi	sistem informasi merupakan sistem di dalam organisasi yang menghubungkan kebutuhan pemrosesan transaksi sehari-hari yang mendukung fungsi operasional manajerial organisasi dengan aktivitas strategis organisasi untuk memberikan laporan yang dibutuhkan kepada pihak eksternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemudahan penggunaan</li> <li>2. Kebermanfaatan</li> </ol> <p><i>Sumber : Davis, 1989</i></p>
5	Komitmen Pimpinan	Komitmen pimpinan pada dasarnya merupakan janji atau tekad seorang pemimpin untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin untuk keberhasilan suatu organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen afektif</li> <li>2. Komitmen Normatif</li> <li>3. Komitmen Berkelanjutan</li> </ol> <p><i>Sumber : Allen &amp; Meyer. (1990), Ismail, (2022)</i></p>

#### 4.7. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan instrumen kuesioner dalam pengumpulan data dengan memberikan gambaran tentang variabel yang akan diteliti dan akan digunakan untuk menguji hipotesis yang akan diajukan.

#### 4.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah proses pengolahan data yang akan menjadi informasi baru. Proses tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga sifat-sifat materi menjadi lebih mudah dipahami dan bermanfaat sebagai solusi permasalahan khususnya yang berkaitan dengan penelitian.

##### 4.8.1 Uji statistik deskriptif

Statistik deskriptif menyediakan deskripsi atau deskripsi suatu data dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, variansi, nilai maksimum, nilai minimum, penjumlahan, jangkauan, kurtosis, dan *skewness* (kemiringan distribusi)

#### **4.8.2 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk menilai apakah suatu kuesioner memiliki keabsahan atau validitas. Hasil penelitian diakui validitasnya apabila data yang terkumpul sejalan dengan keadaan yang sebenarnya pada objek penelitian (Sugiyono, 2016). Untuk mengetahui validitas suatu pertanyaan/ pernyataan , metode yang digunakan yaitu korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel.

Dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel dan untuk menilai validitasnya setiap pertanyaan/ pernyataan yaitu jika korelasi yang dihitung ( $r$  hitung) antara skor butir pertanyaan dan total skor konstruk melebihi korelasi tabel ( $r$  tabel) dengan persamaan  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka pertanyaan/ pernyataan dianggap valid (Ghozali, 2013).

#### **4.8.3 Uji Reliabilitas**

Uji reabilitas digunakan untuk mengukur objek yang sama yang dilakukan dengan beberapa kali dan hasilnya akan tetap sama. Dalam suatu kuesioner disebut andal atau reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Konstruk atau variabel disebut reliabel apabila memberikan skor *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ )  $>$  0,60 (Sugiyono, 2016).

#### **4.8.4 Uji asumsi klasik**

##### **4.8.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi berdistribusi normal sebagai syarat pengujian normalitas data dalam model regresi.

##### **4.8.2.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat hubungan antar variabel bebas dalam suatu model dengan melihat VIF dan *tolerance value*. Model regresi

yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel tersebut tidak ortogonal (nilai korelasinya tidak sama dengan nol). Multikolinearitas dapat dilihat dari *tolerance value* atau nilai *variance inflation factor* (VIF). Batas *tolerance value* di atas 0,10 atau nilai VIF di bawah 10.

#### 4.8.2.3 Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual adalah satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka itu disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka akan disebut heteroskedastisitas. Model yang bagus adalah itu homoskedastisitas atau tidak ada terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.8.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui bagaimana arah dari hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing dari variabel independen berhubungan positif atau negatif dalam memprediksi nilai variabel dependen saat nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi linear berganda yaitu :

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y : Pengelolaan Barang Milik Negara
- X<sub>1</sub> : Kompetensi Sumber Daya Manusia
- X<sub>2</sub> : Sistem Pengendalian Internal
- X<sub>3</sub> : Pemanfaatan Sistem Informasi
- β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>, β<sub>3</sub> : Koefisien regresi masing-masing variabel independen
- ε : *Error*

#### 4.8.4. Moderating Regression Analysis (MRA)

Penelitian ini menggunakan analisis regresi variabel MRA (*Moderating Regression Analysis*) untuk menguji hipotesis. Uji MRA bertujuan untuk mengontrol pengaruh pengaruh variabel moderasi melalui pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel penelitian. Adapun persamaan MRA yang digunakan dalam penelitian ini yaitu.

$$Y = \beta_1 Z \cdot X_1 + \beta_2 Z \cdot X_2 + \beta_3 Z \cdot X_3 + \varepsilon$$

Di mana :

- Y : Pengelolaan Barang Milik Negara
- X<sub>1</sub> : Kompetensi Sumber Daya Manusia
- X<sub>2</sub> : Sistem Pengendalian Internal
- X<sub>3</sub> : Pemanfaatan Sistem Informasi
- Z : Komitmen Pimpinan
- β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>, β<sub>3</sub> : Koefisien regresi masing-masing variabel independen
- ε : *Error*

Kriteria pengambilan keputusan efek variabel moderator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai *Probability* variabel moderator > α (5%), maka variabel moderasi tidak mampu memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
- b. Jika nilai *Probability* variabel moderator < α (5%), maka variabel moderasi mampu memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **5.1 Deskripsi Data**

##### **5.1.1 Gambaran Umum Responden**

Objek dalam Penelitian ini adalah sebanyak 21 Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berlokasi di Sulawesi Selatan yaitu 1 Satker SKPD-TP Dinas PU, 5 Satker Direktorat Jenderal Bina Marga, 4 Satker Direktorat Jenderal Cipta Karya, 6 Satker Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 2 Satker Direktorat Jenderal Perumahan, 1 Satker BPSDM dan 2 Satker Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 63 responden yang terdiri Pejabat Pengguna Barang, orang Petugas/pengurus barang milik negara dan Operator Aplikasi SAKTI dan SIMAN yang berlangsung selama dua bulan.

Dalam penelitian tersebut, diketahui bahwa 63 kuesioner telah disebar dan 63 kuesioner yang dikembalikan sehingga total kuesioner yang dapat diolah sebanyak 63 kuesioner dengan tingkat pengembalian sebesar 100%. Tingkat pengembalian tersebut telah sesuai yang telah dipersyaratkan oleh Sekaran (2016) bahwa tingkat pengembalian kuesioner yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar lebih 30% dari total yang telah didistribusikan.

##### **5.1.2 Analisa Deskripsi Responden**

Analisis deskriptif responden dalam penelitian ini akan mendeskriptifkan data karakteristik responden sesuai dengan jenis kelamin, pendidikan terakhir, umur dan masa bekerja. Adapun responden pada penelitian ini adalah Kepala Satuan kerja dan pegawai yang mengelola Barang Milik Negara sebanyak 63 orang seperti yang digambarkan pada tabel 5.1.

**Tabel 5.1 Deskripsi Responden Penelitian**

Keterangan		Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	33	52.38
	Perempuan	30	47.62
Pendidikan Terakhir	S1	38	60.32
	S2	24	38.10
	S3	1	1.59
Umur	20-30 Tahun	4	6.35
	31-40 Tahun	33	52.38
	>40 Tahun	26	41.27

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan data pada tabel 5.1 di atas, dapat disimpulkan bahwasanya deskripsi responden dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Responden memiliki jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 33 orang responden (52,38%) dari seluruh responden yang diteliti, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 30 orang responden (47,62%) dari total seluruh responden yang digunakan untuk penelitian ini. Data ini menunjukkan bahwa tidak terjadi perbedaan yang terlalu signifikan pada karakteristik jenis kelamin responden.
2. Responden penelitian yang berpendidikan terakhir S1 adalah sebanyak 38 orang responden (60,32%), responden yang berpendidikan terakhir S2 adalah sebanyak 24 orang responden (38,10%), dan responden yang berpendidikan terakhir S3 adalah sebanyak 1 orang responden (1.56%). Data tersebut menunjukkan bahwa responden yang mendominasi yaitu memiliki pendidikan akhir S1 menunjukkan bahwa mayoritas peserta penelitian memiliki latar belakang pendidikan sarjana. Hal ini dapat mencerminkan serta memberikan gambaran tentang tingkat pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki oleh sebagian besar responden.
3. Umur pegawai di Satuan Kerja Kementerian PUPR di Wilayah Sulawesi Selatan yang berumur 20-30 Tahun sebanyak 4 orang responden (6.35%),

yang berumur 31-40 tahun yakni sebanyak 33 orang responden (52,38%), dan yang berumur diatas 40 tahun yakni sebanyak 26 orang responden (41,27%). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada dalam rentang usia 31-40 tahun. Dengan lebih dari separuh responden berada dalam kelompok usia ini, dapat diindikasikan bahwa pegawai di Satuan Kerja Kementerian PUPR di Wilayah Sulawesi Selatan umumnya masih produktif dan telah memiliki pengalaman kerja.

## 5.2 Analisa Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Gambaran statistik digunakan untuk mendeskripsikan jawaban responden tentang indikator-indikator dari variabel penelitian meliputi pengelolaan barang milik negara, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan sistem informasi dan. Adapun makna penilaian secara empiris variabel penelitian ini disajikan pada Tabel 5.2.

**Tabel 5.2 Makna Penilaian Secara Deskriptif Variabel Penelitian**

No.	Nilai rata-rata skor	Interpretasi
1.	1,00 - 1,80	Sangat Rendah/Tidak Baik
2.	1,81 - 2,61	Rendah/Kurang Baik
3.	2,62 - 3,40	Cukup Tinggi/Cukup Baik
4.	3,41 - 4,21	Tinggi/Baik
5	4,22 - 5,00	Sangat Tinggi/Sangat Baik

Sumber: Sugiyono (dimodifikasi) 2019

Pada Tabel 5.2 di atas dalam penelitian ini digunakan sebagai rujukan yang menunjukkan makna atas penilaian jawaban responden dalam melakukan interpretasi hasil penelitian ini. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan hasil penelitian berdasarkan distribusi frekuensi dan nilai rata-rata jawaban responden atas setiap ítem pernyataan dari setiap indikator dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara umum tentang kondisi yang ditemukan oleh peneliti pada objek penelitian. Untuk lebih

jelasan uraian dari analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

### 1. Variabel Kompetensi Sumber Daya manusia (X1)

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) diukur dengan 3 indikator dan 6 item pertanyaan, adapun hasil rekapitulasi data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.3 Hasil statistik deskriptif Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)**

Indikator	Item	Frekuensi Jawaban Responden Rata-Rata Skor					Rata-Rata Skor	Kriteria
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)		
Pengetahuan (X1.1)	X1.1.1	22	23	17	1	0	4.05	Baik
	X1.1.2	15	24	22	2	0	3.83	Baik
	<b>Rata-rata X1.1</b>						<b>3.94</b>	Baik
Keterampilan (X1.2)	X1.2.1	20	27	15	1	0	4.05	Baik
	X1.2.2	20	28	15	0	0	4.08	Baik
	<b>Rata-rata X1.2</b>						<b>4.06</b>	Baik
Sikap/prilaku (X1.3)	X1.3.1	20	24	16	3	0	3.97	Baik
	X1.3.2	22	20	14	7	0	3.90	Baik
	<b>Rata-rata X1.3</b>						<b>3.94</b>	Baik
<b>Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)</b>							<b>3.98</b>	Baik

Sumber: data primer diolah tahun 2024

Berdasarkan Tabel 5.3 dapat diketahui bahwa nilai mean tertinggi pada indikator keterampilan (X1.2) dengan rata-rata sebesar 4,06 dan memiliki kriteria baik. Hal tersebut menunjukkan responden mampu menyusun dan menyajikan laporan barang milik negara dengan baik dan benar dan juga sering mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola barang milin negara. Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar menjadi sangat baik yang paling penting dilakukan agar sumber daya manusia atau pegawai lebih memahami pedoman mengenai prosedur dan proses pengelolaan BMN dengan baik agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, hal tersebut dibuktikan dengan nilai rata-rata terendah pada indikator pengetahuan (X1.1) dengan rata-rata sebesar 3,94. selain itu, agar pegawai melaksanakan

pekerjaan dengan mengedepankan etika dan kode etik agar terhindar dari pelanggaran yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan organisasi.

## 2. Variabel Sistem Pengendalian Intern (X2)

Variabel sistem pengendalian intern diukur dengan menggunakan 5 indikator dan 10 item pertanyaan, rekapitulasi jawaban responden dapat dilihat pada tabel 5.4.

**Tabel 5.4 Hasil statistik deskriptif Sistem Pengendalian Intern (X2)**

Indikator	Item	Frekuensi Jawaban Responden Rata-Rata Skor					Rata-Rata Skor	Kriteria
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)		
Lingkungan Pengendalian (X2.1)	X2.1.1	26	24	13	0	0	4.21	Baik
	X2.1.2	27	21	14	1	0	4.17	Baik
	<b>Rata-rata X2.1</b>						<b>4.19</b>	Baik
Penilaian Risiko (X2.2)	X2.2.1	28	20	15	0	0	4.21	Baik
	X2.2.2	27	23	13	0	0	4.22	Sangat Baik
	<b>Rata-rata X2.2</b>						<b>4.21</b>	Baik
Aktivitas Pengendalian (X2.3)	X2.3.1	29	22	12	0	0	4.27	Baik
	X2.3.2	34	19	10	0	0	4.38	Baik
	<b>Rata-rata X2.3</b>						4.33	Sangat Baik
Informasi dan Komunikasi (X2.4)	X2.4.1	25	23	14	1	0	4.14	Baik
	X2.4.2	15	26	20	2	0	3.86	Baik
	<b>Rata-rata X2.4</b>						<b>4.00</b>	Baik
Pemantauan (X2.5)	X2.5.1	31	27	5	0	0	4.41	Sangat Baik
	X2.5.2	33	25	5	0	0	4.44	Sangat Baik
	<b>Rata-rata X2.5</b>						<b>4.43</b>	Sangat Baik
<b>Sistem Pengendalian Intern (X2)</b>							4.23	Sangat Baik

Sumber: data primer diolah tahun 2024

Berdasarkan Tabel 5.4 dapat diketahui bahwa nilai mean tertinggi pada indikator pemantauan (X2.5) memiliki rata-rata sebesar 4,43 hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terdapat mekanisme/prosedur monitoring dan evaluasi dan juga Kementerian PUPR selalu menindaklanjuti temuan/reviu dan saran yang diberikan oleh auditor (BPK/Inspektorat). Indikator lingkungan pengendalian memiliki rata-rata sebesar 4,19 dan memiliki kriteria setuju hal ini menunjukkan bahwa Kementerian PUPR memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi serta pembagian kewenangan

dan tanggung jawab pegawai dan Pimpinan selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur atau aturan perilaku. Indikator Penilaian Risiko dengan rerata sebesar 4,21 dan memiliki kriteria sangat setuju hal ini menunjukkan bahwa Pimpinan melakukan analisis risiko secara menyeluruh terhadap peluang adanya ancaman terhadap pengelolaan barang milik negara dan juga Pimpinan mempunyai rencana manajemen untuk mengurangi risiko kecurangan pengelolaan barang milik negara. Indikator kegiatan pengendalian dengan rata-rata sebesar 4,33 dan memiliki kriteria sangat baik. Artinya pegawai selalu melakukan pengawasan terhadap pemakaian/penggunaan aset barang milik negara dan juga kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset telah ditetapkan dan diimplementasikan dengan sangat baik. Agar sistem pengendalian internal lebih baik maka yang menjadi perhatian agar petugas barang milik negara menyampaikan laporan barang milik negara dengan tepat waktu dan informasi yang disajikan dalam laporan barang milik negara lengkap, akurat dan tepat waktu, hal tersebut tergambar dalam nilai mean terendah berada pada Indikator Informasi dan Komunikasi (X2.4) dengan rata-rata 4,00.

### **3. Variabel Pemanfaatan sistem Informasi**

Variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi diukur dengan menggunakan 2 indikator dan 4 item pertanyaan, rekapitulasi jawaban responden dapat dilihat pada tabel 5.5.

**Tabel 5.5 Hasil statistik deskriptif Pemanfaatan sistem Informasi (X3)**

Indikator	Item	Frekuensi Jawaban Responden Rata-Rata Skor					Rata-Rata Skor	Kriteria
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)		
Kebermanfaatan (X3.1)	X3.1.1	22	27	12	2	0	4.10	Baik
	X3.1.2	34	19	9	1	0	4.37	Baik
	<b>Rata-rata X3.1</b>						<b>4.23</b>	Baik
Kemudahan Penggunaan (X3.2)	X3.2.1	39	17	7	0	0	4.51	Sangat Baik
	X3.2.2	42	11	10	0	0	4.51	Sangat Baik
	<b>Rata-rata X3.2</b>						<b>4.51</b>	Sangat Baik
<b>Pemanfaatan sistem Informasi (X3)</b>							<b>4.37</b>	Sangat Baik

Sumber: data primer diolah tahun 2024

Berdasarkan Tabel 5.5 dapat diketahui bahwa nilai tertinggi pada indikator kemudahan penggunaan (X3.2) dengan rata-rata sebesar 4,51 dan memiliki kriteria sangat baik, hal tersebut menunjukkan bahwa Sistem Informasi (SIMAN/SAKTI) dapat dipelajari dan dioperasikan dengan mudah dan juga Secara keseluruhan Sistem Informasi (SIMAN/SAKTI) membantu dalam menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Indikator kebermanfaatan memiliki rerata sebesar 4,23 dengan memiliki kriteria baik hal ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi (SIMAN/SAKTI) yang digunakan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kinerja dan produktivitas dan efektivitas dan juga secara keseluruhan sistem informasi yang digunakan bermanfaat terhadap kinerja.

#### **4. Variabel Pengelolaan Barang Milik Negara**

Variabel pengelolaan barang milik negara diukur dengan menggunakan 6 indikator yang terdiri dari 12 item pertanyaan, rekapitulasi jawaban responden dapat dilihat pada tabel 5.6.

Tabel 5.6 Hasil statistik deskriptif Pengelolaan Barang Milik Negara (Y)

Indikator	Item	Frekuensi Jawaban Responden Rata-Rata Skor					Rata-Rata Skor	Kriteria
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)		
Penggunaan (Y.1)	Y.1.1	22	22	19	0	0	4.05	Baik
	Y.1.2	17	26	17	1	2	3.87	Baik
	<b>Rata-rata Y.1</b>						<b>3.96</b>	Baik
Pemanfaatan (Y.2)	Y.2.1	20	29	14	0	0	4.10	Baik
	Y.2.2	23	27	13	0	0	4.16	Baik
	<b>Rata-rata Y.2</b>						<b>4.13</b>	Baik
Pemindahtanganan (Y.3)	Y.3.1	34	18	9	1	1	4.32	sangat Baik
	Y.3.2	33	18	11	0	1	4.30	sangat Baik
	<b>Rata-rata Y.3</b>						<b>4.31</b>	sangat Baik
Penatausahaan (Y.4)	Y.4.1	18	20	22	3	0	3.97	Baik
	Y.4.2	27	16	17	3	0	4.08	Baik
	<b>Rata-rata Y.4</b>						<b>3.95</b>	Baik
Pengamanan (Y.5)	Y.5.1	19	26	15	3	0	3.97	Baik
	Y.5.2	26	19	15	3	0	4.08	Baik
	<b>Rata-rata Y.5</b>						<b>4.02</b>	Baik
Pemeliharaan (Y.6)	Y.6.1	16	21	24	2	0	3.81	Baik
	Y.6.2	18	24	20	1	0	3.94	Baik
	<b>Rata-rata Y.6</b>						<b>3.87</b>	Baik
<b>Pengelolaan Barang Milik Negara (Y)</b>							<b>4.04</b>	Baik

Sumber: data primer diolah tahun 2024

Berdasarkan Tabel 5.6 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi pada indikator pemindahtanganan (Y.3) dengan rata-rata sebesar 4,31 dan memiliki kriteria sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa Pemindahtanganan barang milik negara dilaksanakan melalui penjualan, tukar menukar, hibah serta penyertaan modal pemerintah dan juga Pelaksanaan pemindahtanganan barang milik negara mendapatkan persetujuan dari pengguna barang dan Pengelola Barang telah dilakukan dengan sangat baik. Indikator dengan nilai mean terendah adalah indikator Pemeliharaan dengan rerata sebesar 3,87 dan memiliki kriteria baik hal ini menunjukkan bahwa Kuasa Pengguna Barang perlu meningkatkan pemeliharaan terhadap barang milik negara yang dikuasainya dan juga Pemeliharaan dilaksanakan sesuai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik negara.

Perlu juga perhatian khusus untuk Penggunaan barang negara dengan

rata-rata nilai sebesar 3,96 hal ini menunjukkan bahwa Kuasa Pengguna Barang harus lebih meningkatkan pelaksanaan pelaporan barang milik negara yang dikuasainya kepada pengelola barang dan pengguna barang dan juga penetapan status penggunaan untuk semua barang milik negara perlu ditingkatkan agar aset tersebut digunakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) memiliki rerata sebesar 3,95 dan memiliki kriteria baik hal ini menunjukkan bahwa agar Satuan Kerja meningkatkan pelaksanaan penatausahaan barang milik negara dengan melakukan pencatatan dengan lengkap terhadap semua barang milik negara pada sistem aplikasi barang milik negara dan dilaporkan setiap semesteran dan tahunan dan juga Kuasa Pengguna Barang melakukan Inventarisasi barang milik negara paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima tahun) dan telah membuat Kartu Inventaris Barang (KIB).

## 5. Variabel Komitmen Pimpinan (Z)

Variabel komitmen Pimpinan diukur dengan menggunakan 3 indikator yang terdiri dari 6 item pertanyaan, hasil rekapitulasi jawaban responden dapat dilihat pada tabel 5.7.

**Tabel 5.7 Hasil statistik deskriptif Variabel Komitmen Pimpinan (Z)**

Indikator	Item	Frekuensi Jawaban Responden					Rata-Rata Skor	Kriteria
		Rata-Rata Skor						
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)		
Komitmen afektif (Z.1)	Z.1.1	36	19	8	0	0	4.44	Sangat Baik
	Z.1.2	35	23	4	1	0	4.46	Sangat Baik
	<b>Rata-rata Z.1</b>						4.45	Sangat Baik
Komitmen normatif (Z.2)	Z.2.1	32	25	6	0	0	4.41	Sangat Baik
	Z.2.2	28	30	5	0	0	4.37	Sangat Baik
	<b>Rata-rata Z.2</b>						4.39	Sangat Baik
Komitmen berkelanjutan (Z.3)	Z.3.1	35	22	5	1	0	4.44	Sangat Baik
	Z.3.2	38	22	3	0	0	4.56	Sangat Baik
	<b>Rata-rata Z.3</b>						4.50	Sangat Baik
<b>Komitmen Pimpinan (Z)</b>							4.45	Sangat Baik

Sumber: data primer diolah tahun 2024

Berdasarkan Tabel 5.7 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi pada indikator berkelanjutan (Z.3) dengan rata-rata sebesar 4,50 dan memiliki kriteria sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa Pimpinan memformulasikan kebijakan terkait yang menguntungkan negara dari pengelolaan barang milik negara dan juga Pimpinan memformulasikan kebijakan yang mengefisienkan biaya terkait pengelolaan barang milik negara. mean terendah adalah indikator Komitmen Normatif dengan rata-rata sebesar 4,39 dan memiliki kriteria sangat baik hal ini menunjukkan bahwa Pimpinan loyal terhadap instansi sehingga berpartisipasi aktif dalam pengelolaan barang milik negara dan juga Pimpinan memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam rangka melaksanakan pengelolaan barang milik negara. Indikator Komitmen Afektif dengan rerata sebesar 4,45 memiliki kriteria sangat baik hal ini menunjukkan bahwa Pimpinan selalu berkomunikasi dengan baik, mengendalikan emosi dan perasaan dalam melaksanakan pengelolaan barang milik negara dan juga Pimpinan dapat diandalkan dalam kondisi apapun serta memiliki motivasi yang tinggi dalam rangka pengelolaan barang milik negara.

### **5.3 Uji Validitas**

Uji validitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat mengukur apa yang ingin diukur dan digunakan untuk mengukur valid atau tidak suatu kuesioner. Pengujian validitas dengan menggunakan *Pearson Correlation*. Jika nilai hitung korelasi *pearson* ( $r$ ) lebih besar dari nilai tabel korelasi *pearson*, mengindikasikan item tersebut valid dan layak untuk diikutsertakan pada tahap selanjutnya. Sebaliknya jika nilai hitung korelasi *pearson* ( $r$ ) lebih kecil dari nilai tabel korelasi *pearson*, maka item tersebut tidak valid. Nilai tabel korelasi *pearson* untuk  $N = 63$  ( $df = N-2$ ) adalah 0,246. Hasil pengujian validitas data penelitian sebagaimana terlihat pada tabel 5.8.

Tabel 5.8 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Sumber Daya Manusia	X1.1.1	0.749	0.246	Valid
	X1.1.2	0.648	0.246	Valid
	X1.2.1	0.687	0.246	Valid
	X1.2.2	0.637	0.246	Valid
	X1.3.1	0.763	0.246	Valid
	X1.3.2	0.620	0.246	Valid
Sistem Pengendalian Internal	X2.1.1	0.817	0.246	Valid
	X2.1.2	0.821	0.246	Valid
	X2.2.1	0.857	0.246	Valid
	X2.2.2	0.828	0.246	Valid
	X2.3.1	0.841	0.246	Valid
	X2.3.2	0.753	0.246	Valid
	X2.4.1	0.715	0.246	Valid
	X2.4.2	0.568	0.246	Valid
	X2.5.1	0.618	0.246	Valid
X2.5.2	0.585	0.246	Valid	
Pemanfaatan sistem Informasi	X3.1.1	0.856	0.246	Valid
	X3.1.2	0.855	0.246	Valid
	X3.2.1	0.813	0.246	Valid
	X3.2.2	0.849	0.246	Valid
Komitmen Pimpinan	Z.1.1	0.874	0.246	Valid
	Z.1.2	0.812	0.246	Valid
	Z.2.1	0.884	0.246	Valid
	Z.2.2	0.666	0.246	Valid
	Z.3.1	0.874	0.246	Valid
	Z.3.2	0.793	0.246	Valid
Pengelolaan Barang Milik Negara	Y.1.1	0.761	0.246	Valid
	Y.1.2	0.576	0.246	Valid
	Y.2.1	0.673	0.246	Valid
	Y.2.2	0.648	0.246	Valid
	Y.3.1	0.785	0.246	Valid
	Y.3.2	0.769	0.246	Valid
	Y.4.1	0.674	0.246	Valid
	Y.4.2	0.529	0.246	Valid
	Y.5.1	0.711	0.246	Valid
	Y.5.2	0.523	0.246	Valid
	Y.5.3	0.683	0.246	Valid
	Y.6.1	0.715	0.246	Valid
Y.6.2	0.794	0.246	Valid	

Sumber: hasil olah SPSS (2024)

Sesuai dengan tabel tabel 5.8, ditunjukkan bahwa dapat disimpulkan bahwa skor R hitungnya lebih besar dari R tabelnya ( $R \text{ Hitung} > R \text{ Tabel}$  dan seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan memenuhi syarat validitas.

#### 5.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu dengan menghitung besarnya *Cronbach's Alpha*. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang digunakan sebagai indikator dari variabel penelitian. Jika koefisien alpha yang disajikan  $\geq 0.60$ , maka indikator yang digunakan adalah reliable atau dapat dipercaya (Sugiyono, 2016). Hasil pengujian reliabilitas data penelitian sebagaimana terlihat pada table 5.9.

**Tabel 5.9 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reabilitas	Ket
Kompetensi Sumber daya manusia	0.767	$\geq 0.60$	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0.909	$\geq 0.60$	Reliabel
Pemanfaatan Sistem Informasi	0.862	$\geq 0.60$	Reliabel
Komitmen Pimpinan	0.901	$\geq 0.60$	Reliabel
pengelolaan Barang Milik Negara	0.891	$\geq 0.60$	Reliabel

Sumber: hasil olah SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 5.9 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian dinyatakan memenuhi syarat reliabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai *cronbach's alpha* pada setiap variabel penelitian memiliki nilai melebihi 0.60 ( $\geq 0.60$ ). Hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan dalam penelitian ini bersifat reliabel. Sehingga setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dan apabila pertanyaan diajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

## 5.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah koefisien regresi yang didapat telah benar dan dapat diterima, maka perlu dilakukan pengujian terhadap kemungkinan adanya pelanggaran asumsi klasik dan agar hasil kesimpulan yang diperoleh tidak menimbulkan nilai yang bias sebelum melakukan analisis model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

### 5.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah tiga model regresi variabel terikat dan variabel bebas ketiganya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pada prinsipnya normalitas dapat dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Untuk menguji normalitas data, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan melihat hasil dari uji kolmogorov smirnov. Jika satu cara probabilitas lebih besar dari 5% ( $> 0.05$ ) maka data penelitian berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 5.10.

**Tabel 5. 10 Hasil Uji Normalitas**

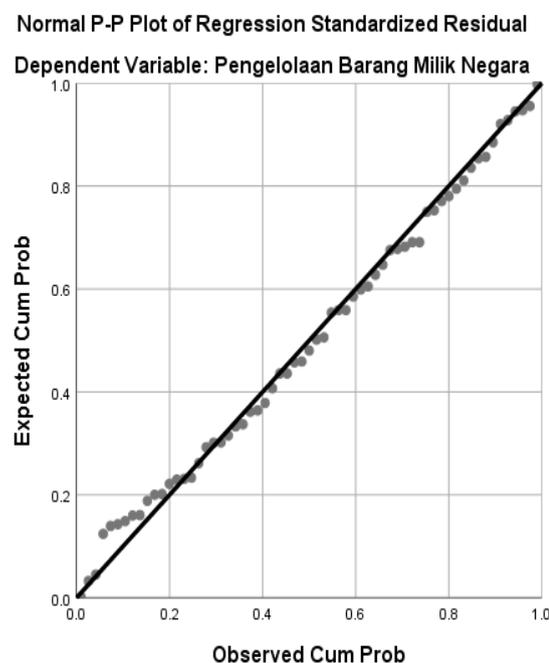
<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
<b>N</b>		63
<b>Normal Parameters<sup>a,b</sup></b>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.31899042
<b>Most Extreme Differences</b>	Absolute	.071
	Positive	.051
	Negative	-.071
<b>Test Statistic</b>		.071
<b>Asymp. Sig. (2-tailed)</b>		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: hasil olah SPSS (2024)

Uji statistik dilakukan dengan uji statistik uji Kolmogorov-Smirnov. Data diuji dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S). berdasarkan tabel diatas, hasil uji kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikan adalah 0,200 yang berarti nilai ini jauh di atas 0,05 hal ini memberikan arti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi dengan normal, yaitu jika hasil pengujian diperoleh nilai Sig > 0.05 ( $0.200 > 0.05$ ), maka asumsi normalitas terpenuhi.

Untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak dilihat dari grafik Normal P-P *Plot of regression standardized residual*. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan, jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas dapat dipilih pada gambar 5.1

**Gambar 5. 11 Hasil Uji Normalitas**



Sumber: hasil olah SPSS (2024)

Berdasarkan pada sajian data pada gambar 5.11 di atas, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena telah memenuhi asumsi normalitas.

### 5.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen yang kuat dalam model regresi dengan menghitung nilai toleransi dan nilai VIF (*Variance Inflating Factor*). Jika nilai *tolerance* >0.10 dan VIF <10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas, begitu juga sebaliknya yaitu nilai *tolerance* <0,10 dan VIF >10, maka dapat disimpulkan terdapat multikolinearitas. Hasil uji asumsi multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.12.

**Tabel 5. 12 Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kompetensi SDM	0.612	1.63	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Sistem Pengendalian Internal	0.639	1.56	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pemanfaatan Sistem Informasi	0.883	1.13	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: hasil olah SPSS (2024)

Tabel 5.12 diatas menunjukkan bahwa variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. kompetensi Sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan sistem informasi memiliki nilai *tolerance* diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas (memiliki data yang sama) karena skor *tolerance* nya lebih dari 0.1 (> 0.1) dan skor VIF lebih kecil dari 10 (< 10), sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.

### 5.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menentukan apakah terdapat ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Pada uji Glejser, nilai absolut residual dijadikan sebagai variabel Y yang diregresikan dengan variabel bebas. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil uji asumsi heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.13.

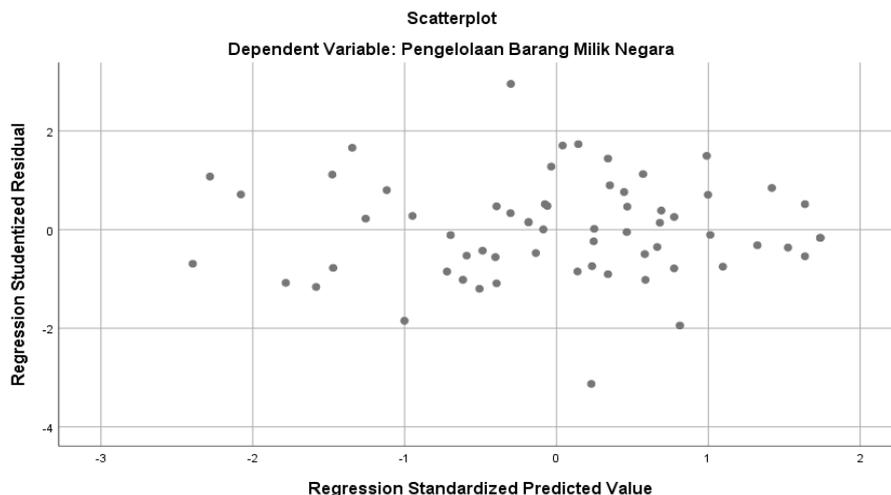
**Tabel 5. 13 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

<b>Variabel</b>	<b>Sig.</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Kompetensi SDM</b>	0.710	Tidak Terjadi heteroskedastisitas
<b>Pengendalian Internal</b>	0.420	Tidak Terjadi heteroskedastisitas
<b>Pemanfaatan Sistem Informasi</b>	0,996	Tidak Terjadi heteroskedastisitas

Sumber: hasil olah SPSS (2024)

Merujuk pada sajian data tabel di atas, diketahui bahwa variabel yang dianalisis dalam penelitian ini memenuhi syarat heteroskedastisitas dikarenakan skor probabilitas signifikansi tiap variabelnya lebih besar dari 0.05 secara keseluruhan. Untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain dilihat dari grafik scatterplot regression standardized predicted value, jika terlihat pancaran data bersifat acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal ini berarti bahwa model tersebut tidak memenuhi heteroskedastisitas sehingga merupakan model regresi yang baik. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar 5.2 berikut.

**Gambar 5. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: hasil olah SPSS (2024)

Merujuk pada sajian data gambar 5.2 di atas, dapat diperhatikan bahwasanya titik-titik tersebar secara menyeluruh tanpa membuat suatu pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi syarat heteroskedastisitas.

## 5.6 Uji Hipotesis

### 5.6.1 Analisis Regresi

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil uji statistik menentukan diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model regresi linear berganda. Model ini menguji Kejelasan sasaran Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), Pemanfaatan Sistem Informasi (X3) terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara (Y).

Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan *program SPSS*, hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 5.14.

Tabel 5. 14 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-0.279	0.383		-0.728	0.47
Kompetensi SDM	0.311	0.092	0.310	3.394	0.001
Pengendalian Internal	0.526	0.092	0.513	5.742	0.000
Pemanfaatan Sistem Informasi	0.196	0.069	0.218	2.863	0.006

Sumber: hasil olah SPSS (2024)

Berdasarkan hasil uji regresi diatas, dapat disusun persamaan matematis sebagai berikut:

$$Y = -0,297 + 0.311X_1 + 0.526X_2 + 0,196X_3 + e$$

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan secara parsial dengan menggunakan uji t yang dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta dalam tabel diatas sebesar -0,297, yang berarti bahwa Variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan sistem informasi bersifat konstan (tetap) maka variabel dependen yaitu pengelolaan barang milik negara akan mengalami penurunan sebesar -0,279 atau -27,9%.
- 2) Kompetensi sumber daya manusia koefisien regresi sebesar 0,311. Hal ini berarti jika variabel kompetensi sumber daya manusia bertambah satu kesatuan maka pengelolaan barang milik negara akan bertambah sebesar 0,311 atau 31,1% dengan asumsi variabel lain tetap (konstan). Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara kompetensi sumber daya manusia (X1) terhadap pengelolaan barang milik Negara (Y).

- 3) Pengendalian internal memiliki koefisien regresi sebesar 0,526. Hal ini berarti jika variabel sistem pengendalian internal bertambah satu kesatuan maka pengelolaan barang milik negara akan bertambah sebesar 0,526 atau 52,6% dengan asumsi variabel lain tetap (konstan). Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara sistem pengendalian internal (X2) terhadap pengelolaan barang milik Negara (Y).
- 4) Pemanfaatan sistem informasi memiliki koefisien regresi sebesar 0,196. Hal ini berarti jika variabel pemanfaatan sistem informasi bertambah satu kesatuan maka pengelolaan barang milik negara akan bertambah sebesar 0,196 atau 19,6% dengan asumsi variabel lain tetap (konstan). Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara pemanfaatan sistem informasi (X3) terhadap pengelolaan barang milik Negara (Y).

#### 5.6.1.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai koefisien determinasi atau nilai R square ( $R^2$ ) Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar (persentase) variasi berpengaruh terhadap dependen (Ghozali,2018). Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ). Semakin tinggi nilai  $R^2$  dari model regresi maka hasil regresi semakin baik. Nilai  $R^2$  yang mendekati 1 berarti variabel memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependennya. Berikut hasil pengujian koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) yang disajikan pada tabel 5.15

**Tabel 5. 15 Uji Summary**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>
<b>1</b>	.836 <sup>a</sup>	.699	.684	.32700

Sumber: hasil olah SPSS (2024)

Nilai koefisien determinan R Square pada hasil pengujian diatas menunjukkan nilai 0,684 atau 68,4%. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel

pengelolaan barang milik pemerintah dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia (X1), sistem pengendalian internal (X2) dan Pemanfaatan sistem informasi (X3) adalah sebesar 68,4%. Adapun sisanya 31,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini.

### 5.6.1.2 Uji T

Pengujian secara parsial (uji t) digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan dapat pula digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas yang paling dominan. Secara teknis pengujiannya dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel pada taraf signifikansi 0,05. Hasil pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel 5.16

**Tabel 5.16 Hasil Uji T**

<b>Variabel</b>	<b>Unstandardized Coefficients</b>	<b>t-hitung</b>	<b>t-tabel</b>	<b>Sig.</b>	<b>Ket</b>
<b>Kompetensi SDM</b>	0.311	3.394	2.001	0.001	Signifikan
<b>Pengendalian Internal</b>	0.526	5.742	2.001	0.000	Signifikan
<b>Pemanfaatan Sistem Informasi</b>	0.196	2.863	2.001	0.006	Signifikan

Sumber: hasil olah SPSS (2024)

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian yang diajukan dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. **Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai t-hitung sebesar 3,394 lebih besar dari t-tabel sebesar 2.001 dengan tingkat signifikansi  $0.001 < 0.05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan barang milik negara, hal ini berarti hipotesis 1 diterima.

## **2. Pengendalian internal berpengaruh terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai t-hitung sebesar 5,742 lebih besar dari t-tabel sebesar 2.001 dengan tingkat signifikansi  $0.000 < 0.05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan barang milik negara, hal ini berarti hipotesis 2 diterima.

## **3. Pemanfaatan Sistem Informasi berpengaruh terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel pemanfaatan sistem informasi memiliki nilai t-hitung sebesar 2,863 lebih besar dari t-tabel sebesar 2.001 dengan tingkat signifikansi  $0.006 < 0.05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan barang milik negara, hal ini berarti hipotesis 3 diterima.

### **5.6.2 Analisis Regresi Moderasi (*Multiple Regression Analysis*)**

#### **5.6.2.1 Uji Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinan R square pada hasil pengujian di atas menunjukkan nilai 0,747 atau 75,7%. Hasil ini mengindikasikan bahwa dengan adanya variabel Komitmen Pimpinan sebagai moderasi, pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Pengendalian Internal (X2) dan Pemanfaatan Sistem Informasi (X3) terhadap pengelolaan barang milik negara (Y). mengalami peningkatan menjadi 74,7%, sedangkan sisanya sebesar 25,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 5. 17 Uji Summary Moderasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.886 <sup>a</sup>	.785	.757	.28670

Sumber: hasil olah SPSS (2024)

### 5.6.2.1 Uji T

Secara teknis pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t- hitung dan t-tabel pada taraf signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,05. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel 5.18.

Tabel 5. 18 Hasil Analisis Regresi Moderasi

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
X1_Z	0.325	0.171	2.025	1.903	0.062
X2_Z	-0.397	0.136	-2.607	-2.912	0.005
X3_Z	0.395	0.126	2.801	3.132	0.003

Sumber: hasil olah SPSS (2024)

Berdasarkan hasil uji regresi moderasi variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Pengendalian Internal (X2) dan Pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara (Y). setelah berinteraksi dengan variabel Komitmen Pimpinan (Z), maka dapat disusun persamaan matematis sebagai berikut.

$$Y = 5.345 - 1.154X1 + 2.281X2 - 1.553X3 - 1.248Z + 0.325X1Z - 0.397X2Z + 0.3953Z + e$$

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian yang diajukan dapat dijelaskan sebagai berikut .

**1. *Komitmen Pimpinan Dapat Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara***

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa  $X1\_Z$  memiliki nilai t- hitung sebesar 1,903 yang lebih kecil dari t-tabel sebesar 2.001 dengan taraf signifikansi  $0.062 > 0.05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa Komitmen pimpinan tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan barang milik negara, hipotesis 4 ditolak.

**2. *Komitmen Pimpinan Dapat Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara***

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa  $X2\_Z$  memiliki nilai t- hitung sebesar 2,912 lebih besar dari t-tabel sebesar 2.001 dengan taraf signifikansi  $0.005 < 0.05$  dapat disimpulkan bahwa komitmen pimpinan memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan barang milik negara, hipotesis 5 diterima.

**3. *Komitmen Pimpinan Dapat Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara***

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa  $X2\_Z$  memiliki nilai t- hitung sebesar 3,132 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 2.001 dengan taraf signifikansi  $0.003 < 0.05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen pimpinan mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara, hipotesis 6 diterima.

## **BAB VI**

### **PEMBAHASAN**

#### **6.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara**

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan bahwa Kompetensi Sumber daya Manusia berpengaruh terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Hal ini berarti semakin jelas Kompetensi yang dimiliki oleh pegawai Satuan Kerja Kementerian PUPR di Wilayah Sulawesi Selatan meningkat, maka semakin baik pengelolaan barang milik negara. Sumber daya manusia merupakan bagian utama keberhasilan instansi. Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penentu apakah instansi pemerintah tersebut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara akan berjalan dengan baik apabila ditangani oleh aparatur yang berkualitas.

Hasil Penelitian ini konsisten dengan teori *stewardship* menggambarkan bahwa manajemen sebagai *steward* yang menerima amanah untuk melaksanakan kegiatan organisasi dengan penuh tanggung jawab, oleh sebab itu dalam bertindak sebagai *steward* memerlukan kompetensi sumber daya manusia sehingga pelayanan publik berjalan dengan baik.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu untuk keberhasilan suatu organisasi. Setiap organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga mendukung dalam terlaksananya apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Spencer & Spencer (1993) mendefinisikan bahwa kompetensi merupakan karakteristik dari seorang individu yang berkinerja unggul dalam suatu pekerjaan/situasi. Seseorang dapat dikatakan tidak berkompoten apabila ia dinilai

gagal dalam melakukan suatu tugas tertentu yang diwajibkan oleh lingkungannya (Pratama *et al.*, 2015). Kompetensi pegawai bukan hanya tentang kemampuan menyelesaikan pekerjaannya akan tetapi terkait juga dengan perilaku pegawai tersebut dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya seperti yang diungkapkan oleh Martineza bahwa kompetensi tidak hanya kemampuan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan baik akan tetapi juga berfungsi sebagai respon terhadap situasi lingkungan yang tidak bisa dikontrol (Carnero *et al.*, 2023).

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Gafar, (2018). Dalam penelitian Tabita (2021) menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pengelolaan aset daerah, penelitian oleh Rahmadhani dan Ariani (Prayogia *et al.*, 2021; Prihatini *et al.*, 2020; Rahmadhani & Ariani, 2022; Ricardo *et al.*, 2022) menyatakan hal yang sama.

## **6.2 Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara**

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan bahwa Pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik negara. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah, maka semakin tinggi pengelolaan barang milik negara. Untuk terciptanya pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan sehingga terealisasinya keluaran yang memberikan manfaat secara luas, perlu adanya sistem yang digunakan untuk pengendalian internal berguna untuk mengawasi dan mengelola seluruh kegiatan yang dirancang untuk memberikan kepastian apakah aktivitas tersebut berlangsung dengan pedoman yang ada serta pencapaian tujuan dari organisasi terkait.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Teori *stewardship* menggambarkan bahwa manajerial organisasi bertindak sebagai manajer (*steward*) dengan penuh

kesadaran, memiliki tanggung jawab dan dengan bijaksana demi kebaikan organisasi dan tidak termotivasi dengan tujuan organisasi untuk memperoleh kepercayaan publik (Donaldson & Davis, 1991). Dalam mengelola barang milik negara diperlukan adanya sistem pengendalian bertujuan untuk mengontrol pelaksanaan sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan mengikuti peraturan yang sesuai dan kemudian tidak ditemukan lagi adanya temuan/permasalahan yang berulang dalam pengelolaannya.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah untuk mewujudkan *good governance* sehingga pengendalian internal sangat penting dan merupakan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 yaitu Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk menjamin keamanan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, melindungi aset negara, dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan (Presiden Republik Indonesia, 2008).

Yuliana & Taufik (2021) mengungkapkan bahwa agar kinerja pengelola aset lebih optimal dan juga untuk mencegah kemungkinan hambatan maka dibutuhkan peraturan yang jelas dalam mengontrol dan memberi arahan dalam menjalankan tugas aparatur. Dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengendalian internal adalah salah satu penentu yang memengaruhi manajemen aset, itu menandakan bahwa sistem pengendalian intern telah diterapkan sebaik-baiknya. Hasil penelitian ini konsisten dengan Bria, (2019) yang menyimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan barang milik negara

### **6.3 Pemanfaatan Sistem Informasi Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara**

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan bahwa Pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik negara. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin baik sistem informasi yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, maka semakin tinggi pengelolaan barang milik negara. Pemanfaatan sistem informasi seperti aplikasi SIMAN digunakan untuk memudahkan dalam mengelola barang milik negara menjadikan pekerjaan lebih cepat dan akurat dan efisien.

Sistem informasi yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang akurat, memungkinkan pengguna informasi untuk dengan mudah memahami tentang informasi yang telah disajikan. dikaitkan dengan teori *stewardship*, Pemerintah adalah *steward* dengan memfasilitasi dan memberdayakan untuk pelaksanaan pelayanan publik dengan didukung oleh fasilitas yang digunakan sebagai aktivitas penyelesaian suatu permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kewajiban untuk mencapai tujuan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tabita (2021) mengemukakan bahwa semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi maka akan menjadikan pengelolaan aset negara yang efektif dalam sebuah organisasi dan menyimpulkan hasil penelitian bahwa pemanfaatan sistem informasi dapat memengaruhi pengelolaan aset daerah.

### **6.4 Komitmen pimpinan tidak dapat memoderasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara**

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan bahwa Komitmen pimpinan tidak dapat memoderasi pengaruh kompetensi Sumber daya manusia terhadap pengelolaan barang milik negara. hasil pengujian menunjukkan bahwa

Komitmen pimpinan tidak selalu menjadi faktor penentu dalam moderasi pengaruh kompetensi SDM. Pada dasarnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan barang milik negara merupakan hal terpenting yang dimiliki oleh Satuan Kerja Kementerian PUPR khususnya di Sulawesi Selatan, sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan dan berkompeten dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara dan juga adanya aturan yang mengatur pelaksanaan pekerjaan sehingga dengan tingginya kompetensi SDM yang dimiliki dalam mengelola Barang Milik Negara sehingga ada atau tidaknya komitmen pimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan barang milik negara.

Penelitian tidak sejalan dengan Teori stewardship menggambarkan situasi bahwa pimpinan tidak termotivasi dengan tujuan individu akan tetapi lebih mementingkan kepentingan organisasi. Komitmen pimpinan mempunyai peranan penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Pimpinan yang berkomitmen mengarahkan bawahannya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi sehingga pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab dapat selesai tepat waktu dan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Hasil penelitian Yuliana & Taufik, 2021 (2021) menyimpulkan bahwa kualitas aparatur dimoderasi oleh komitmen pimpinan dalam mendukung efektivitas manajemen aset tetap daerah, sehingga pimpinan harus berkomitmen untuk menciptakan SDM yang andal sehingga pengurus barang bekerja untuk menjalankan visi dan misi organisasi salah satunya dengan memfasilitasi petugas barang milik negara untuk menambah pengetahuan dengan cara mengikutkan dalam kegiatan Pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang milik negara.

### **6.5 Komitmen pimpinan dapat memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap barang milik negara**

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan bahwa Komitmen pimpinan dapat memoderasi pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan barang milik negara. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komitmen pimpinan yang kuat dapat memperlemah pengaruh pengendalian internal terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Jika pimpinan terlalu terlibat atau mengontrol secara berlebihan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik negara, ini bisa menyebabkan pengawasan berlebihan yang justru mengganggu efektivitas sistem pengendalian internal, pegawai mungkin merasa tidak dipercaya atau termotivasi untuk mematuhi sistem pengendalian internal karena mereka merasa pimpinan akan mengawasi segala sesuatunya.

Hal tersebut sejalan dengan hasil hasil responden terhadap variabel moderasi Komitmen Pimpinan (Z) bahwa Komitmen berkelanjutan merupakan indikator yang paling tinggi dengan nilai rata-rata 4,50 (sangat baik) yaitu pimpinan memformulasikan kebijakan terkait yang menguntungkan negara dan kebijakan yang mengefisienkan biaya terkait pengelolaan BMN, komitmen pimpinan tersebut yang sangat kuat sehingga kebijakan yang terlalu fokus pada penghematan biaya dapat mengurangi anggaran untuk pengendalian internal, menurunkan kualitas proses pengendalian, dan mengurangi sumber daya yang diperlukan untuk fungsi pengawasan. Selain itu, karyawan mungkin merasa tertekan untuk menekan biaya sehingga mengurangi motivasi mereka untuk mematuhi prosedur pengendalian internal dengan benar. Akibatnya, risiko terkait pengelolaan barang milik negara mungkin tidak terdeteksi atau ditangani dengan baik sehingga mengganggu efektivitas pengendalian internal yang diperlukan.

Sistem pengendalian intern merupakan pondasi penting dalam mencegah dan mendeteksi tindakan penggelapan (*fraud*), sekaligus membimbing serta

memberikan pengawasan terhadap sumber daya yang ada pada organisasi. Keandalan sistem pengendalian intern berdampak terhadap hasil dari pengelolaan barang milik negara. Dalam perjalanannya, pimpinan instansi diamanatkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian sehingga terbentuknya lingkungan yang kondusif dalam menerapkan sistem pengendalian intern di organisasinya. maka dari itu dibutuhkan komitmen pimpinan yang kuat agar unsur-unsur sistem pengendalian intern berjalan dengan baik untuk mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan barang milik negara. Bodnar and Hopwood (2003:215) bahwa tanggung jawab utama untuk berjalannya pengendalian internal ada pada manajemen/pimpinan. COSO (2009:49) mengistilahkan tanggung jawab tersebut sebagai : *tone of the top* – keteladanan dari atas/pimpinan (Haliah, 2021). Ketika pimpinan berkomitmen untuk menerapkan sistem pengendalian intern maka akan mendorong bawahan yang terlibat untuk berbuat yang sama sehingga terciptanya nilai tambah dalam pengelolaan aset negara.

Namun, temuan ini juga mengungkap bahwa Komitmen Pimpinan yang kuat, di mana kecenderungan mengabaikan atau melonggarkan Pengendalian Internal demi mencapai tujuan organisasi dapat terjadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara Komitmen Pimpinan yang kuat dengan penerapan Pengendalian Internal yang efektif sangat penting. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan peningkatan kesadaran para pemimpin akan potensi dampak negatif dari Komitmen Pimpinan yang berlebihan, penguatan sistem Pengendalian Internal, komunikasi yang transparan, dan pengembangan budaya etis dalam organisasi. penting bagi pimpinan untuk mengintegrasikan pengendalian internal sebagai bagian dari strategi keseluruhan pengelolaan barang milik negara untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Pimpinan yang memiliki komitmen tinggi

perlu melihat pengendalian internal sebagai alat yang mendukung, bukan menghambat, pencapaian tujuan organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana & Taufik, 2021 menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern dimoderasi oleh komitmen pimpinan terhadap efektivitas pengelolaan aset pada Kabupaten Bengkalis.

#### **6.6 Komitmen pimpinan Dapat Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara**

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan bahwa Komitmen pimpinan dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan sistem informasi terhadap Pengelolaan barang milik negara. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik daerah akan semakin kuat, Dengan memanfaatkan sistem informasi memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga menghasilkan pekerjaan yang memberikan informasi yang memadai, andal dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, dibutuhkan pimpinan yang berkomitmen untuk mengelola sumber daya tersebut yang memberikan dukungan kepada bawahannya agar pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara tepat dan cepat melalui pemanfaatan teknologi tersebut.

Zada *et al.*, (2023) bahwa pemimpin yang efektif mempunyai tanggung jawab untuk membimbing dan memotivasi bawahannya, menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas serta mengelola sumber daya untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan selesai tepat waktu dan sesuai anggaran yang tersedia. Teori *stewardship* mengarahkan pemimpin untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan barang milik negara yaitu memastikan efisiensi, transparansi, dan keamanan sistem informasi guna meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara yang efektif.

Salah satu aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik negara yaitu aplikasi SIMAN yang memberikan informasi aset

mengenai jumlah, nilai, keberadaan, potensi, kondisi aset negara dan aplikasi tersebut sudah terintegrasi ke aplikasi pengelola barang maupun pengguna barang. Tabita (2021) menyimpulkan bahwa dengan tingginya komitmen pimpinan dalam mendukung kualitas sistem informasi, maka efektivitas pengelolaan BMD dapat ditingkatkan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2021) menunjukkan bahwa komitmen mampu memoderasi pengaruh pengaruh sistem informasi terhadap efektivitas pengelolaan aset pemerintah.

## BAB VII

### PENUTUP

#### 7.1 Kesimpulan

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin jelas kompetensi yang dimiliki oleh pegawai Satuan Kerja Kementerian PUPR di Sulawesi Selatan meningkat, maka semakin baik pengelolaan barang milik negara. Berdasarkan teori *stewardship* menggambarkan bahwa manajemen sebagai *steward* yang menerima amanah untuk melaksanakan kegiatan organisasi dengan penuh tanggung jawab, oleh sebab itu dalam bertindak sebagai *steward* memerlukan kompetensi sumber daya manusia sehingga pelayanan publik berjalan dengan baik.
2. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik negara. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah, maka semakin tinggi pelaksanaan pengelolaan barang milik negara. Untuk terciptanya pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan sehingga terealisasinya keluaran yang memberikan manfaat secara luas, perlu adanya sistem yang digunakan untuk pengendalian internal berguna untuk mengawasi dan mengelola seluruh kegiatan yang dirancang untuk memberikan kepastian apakah aktivitas tersebut berlangsung dengan pedoman yang ada serta pencapaian tujuan dari organisasi terkait. Berdasarkan teori *stewardship* menggambarkan bahwa manajerial organisasi bertindak sebagai manajer (*steward*) yang memiliki tanggung jawab demi kebaikan organisasi dengan tujuan organisasi untuk memperoleh kepercayaan publik.

3. Pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik negara. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin baik sistem informasi yang dimiliki oleh Satuan Kerja Kementerian PUPR di Sulawesi Selatan maka semakin tinggi pengelolaan barang milik negara. Berdasarkan teori *stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah adalah *steward* dengan memfasilitasi dan memberdayakan untuk pelaksanaan pelayanan publik dengan didukung oleh fasilitas yang digunakan sebagai aktivitas penyelesaian suatu permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kewajiban untuk mencapai tujuan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan
4. Komitmen pimpinan tidak dapat memoderasi pengaruh kompetensi Sumber daya manusia terhadap pengelolaan barang milik negara. Pada dasarnya Kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola barang milik negara merupakan hal yang terpenting dimiliki oleh Kementerian PUPR khususnya di Sulawesi Selatan, sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan dan berkompeten dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara dan juga adanya aturan yang mengatur pelaksanaan pekerjaan sehingga dengan tingginya kompetensi SDM yang dimiliki dalam mengelola Barang Milik Negara sehingga ada atau tidaknya komitmen pimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan barang milik negara. Hal ini berbeda dengan teori *stewardship* yang menekankan peran pemimpin dalam meningkatkan efektivitas barang milik negara melalui motivasi SDM dan budaya organisasi yang mendukung.
5. Komitmen pimpinan dapat memoderasi pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan barang milik negara. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komitmen pimpinan memperlemah pengaruh pengendalian internal terhadap pengelolaan barang milik negara. Jika pimpinan terlalu terlibat atau mengontrol secara berlebihan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik

negara, ini bisa menyebabkan pengawasan berlebihan yang justru mengganggu efektivitas sistem pengendalian internal, pegawai mungkin merasa tidak dipercaya atau termotivasi untuk mematuhi sistem pengendalian internal karena mereka merasa pimpinan akan mengawasi segala sesuatunya. Komitmen Pimpinan yang kuat dapat melemahkan pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sejalan dengan teori *stewardship* yang menekankan peran pemimpin sebagai pelayan organisasi, penting bagi pimpinan untuk mengintegrasikan pengendalian internal sebagai bagian dari strategi keseluruhan pengelolaan barang milik negara untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Pimpinan yang memiliki komitmen tinggi perlu melihat pengendalian internal sebagai alat yang mendukung, bukan menghambat, pencapaian tujuan organisasi.

6. Komitmen pimpinan dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan sistem informasi terhadap Pengelolaan barang milik negara. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik daerah akan semakin kuat, Dengan memanfaatkan sistem informasi memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga menghasilkan pekerjaan yang memberikan informasi yang memadai, andal dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, dibutuhkan pimpinan yang berkomitmen untuk mengelola sumber daya tersebut yang memberikan dukungan kepada bawahannya agar pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara tepat dan cepat melalui pemanfaatan teknologi tersebut. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* yang menekankan pentingnya kepercayaan, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

## **7.2 Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut.

1. Penelitian ini memberikan dukungan kepada pemerintah agar dapat meningkatkan pengelolaan barang milik negara. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya mengenai Kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan barang milik negara dengan komitmen pimpinan sebagai moderasi pada Kementerian PUPR di sulawesi selatan.
2. Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi Satuan Kerja Kementerian PUPR di provinsi sulawesi selatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan dalam sistem pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

## **7.3 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan yaitu Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan ruang lingkup yang lebih luas, misalnya menggunakan satuan kerja di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara keseluruhan sebagai objek penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel independen seperti Kepuasan kerja, kepercayaan organisasi dan disiplin kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdelhamid, M. S., Beshara, I., & Ghoneim, M. (2015). Strategic asset management: Assessment tool for educational building in Egypt. *HBRC Journal*, 11(1), 98–106. <https://doi.org/10.1016/j.hbrj.2014.01.004>
- Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. *Journal of Occupational Psychology*, 63(1), 1–18. <https://doi.org/10.1111/J.2044-8325.1990.TB00506.X>
- Almeida, N., Trindade, M., Komljenovic, D., & Finger, M. (2022). A conceptual construct on value for infrastructure asset management. *Utilities Policy*, 75(October 2019), 101354. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2022.101354>
- Argyris, C. (1973). Personality and Organization Theory Revisited. *Administrative Science Quarterly*, 18(2), 141. <https://doi.org/10.2307/2392060>
- Aris, R., Ardian, & Muammar. (2022). Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Negara Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(01), 1–7. <https://jurnal.politeknikaceh.ac.id/index.php/jia/article/view/115>
- Badan Kepegawaian Negara. (2008). Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008. In *Badan Kepegawaian Negara* (Issue 11, pp. 1–33).
- Badan Kepegawaian Negara. (2013). *Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajeria*.
- BPK RI. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2022 Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)*, 12–26.
- Bria, B. Y. L. (2019). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Tetap dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi*. Tesis. Malang : Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Carnero, M. C., Martínez-Corral, A., & Cárcel-Carrasco, J. (2023). Fuzzy multicriteria evaluation and trends of asset management performance: A case study of Spanish buildings. *Case Studies in Construction Materials*, 19(October). <https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e02660>
- Charles, J. (2022). *Konsolidasi Penataan Pemanfaatan Aset Bendungan Bili-bili Untuk Tata Kelola Lebih Baik*. Kementerian Keuangan. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-berita/29274/Konsolidasi-Penataan-Pemanfaatan-Aset-Bendungan-Bili-bili-Untuk-Tata-Kelola-Lebih-Baik.html>

- COSO. (2024). *Internal Control | COSO*. <https://www.coso.org/guidance-on-ic>
- Davis, F. D. (1993). User acceptance of information technology: system characteristics, user perceptions and behavioral impacts. In *International Journal of Man-Machine Studies* (Vol. 38, Issue 3, pp. 475–487). <https://doi.org/10.1006/imms.1993.1022>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *The Academy of Management Review*, 22(1), 20. <https://doi.org/10.2307/259223>
- Edo, O. C., Ang, D., Etu, E. E., Tenebe, I., Edo, S., & Diekola, O. A. (2023). Why do healthcare workers adopt digital health technologies - A cross-sectional study integrating the TAM and UTAUT model in a developing economy. *International Journal of Information Management Data Insights*, 3(2), 100186. <https://doi.org/10.1016/j.jjime.2023.100186>
- Eka Yuliana, R., & Taufik, T. (2021). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi The Effect Of The Quality Of Application, Regulation, Management Information System, Internal Control System on Effectiveness of Fixed Assets Management In Bengkalis Regency Government With The Commitment Of The Leader as . In *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 5, Issue 2). <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Farhana, F., Arifuddin, A., & Darmawati. (2023). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan. *Humantech: Jurnal Ilmiah*, 2(9), 1970–1979. <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/3559%0Ahttp://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/download/3559/2919>
- Gafar, A. A. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Optimalisasi Pengelolaan Aset Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Dimoderasi Efektivitas Pengendalian Internal*. Tesis. Makassar : Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- GFMAM. (2016). *The Maintenance Framework First Edition*. [www.gfmam.org](http://www.gfmam.org)
- Haliah. (2021). *Kualitas Informasi Laporan Keuangan*. Makassar : K-Media.
- Helmi, B., Nelly Sari, R., & Silfi, A. (2023). Current Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Manajemen Aset Tetap: Peran Moderasi Sistem Pengendalian Intern Determinants of the Effectiveness of Fixed Assets Management: the Moderation Role of the Internal Control System. *Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini, Jurnal Studi Akuntansi, Program Ekonomi Dan Bisnis, Fakultas Riau, Universitas*, 4(1), 1–19. <https://doi.org/10.31258/current.4.1.1-19>
- Imtikhanah, S., & Lukmana, W. (2023). The Effect of Competence of the Apparatus, Internal Control System and Legal Audits on State-Owned Assets Management and Information System as a Moderating. *Proceedings of the 3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021)*, 1041–1049.

[https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7\\_174](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7_174)

- Ismail, A. baba. (2022). *Pemanfaatan Aset dan Komitmen Pimpinan dalam Meningkatkan Pendapatan Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Aset*. Universitas Hasanuddin. Tesis. Makassar : Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Jogiyanto. (2005). *Jogiyanto: Sistem teknologi informasi - Google Scholar*. [https://scholar.google.com.sg/scholar?hl=en&as\\_sdt=0,5&cluster=8382893969491478605](https://scholar.google.com.sg/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&cluster=8382893969491478605)
- Karina, R., Nirwana, N., & Indrijawati, A. (2023). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai pemoderasi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(11). <https://www.journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/3401>
- Kementerian Keuangan. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.06/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang*. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Derah. *Menteri Keuangan*, 040501, 1–66.
- Kementerian Keuangan. (2021). *PMK Nomor 207 Tahun 2021 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara*. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Kementerian Keuangan. (2022). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*.
- Kementerian PUPR. (2022). *Wujudkan Transformasi Digital dan Tertib Pengelolaan BMN, Kementerian PUPR Gelar Rapat Kerja Pengelolaan BMN Tahun 2022*. Kementerian PUPR. <https://pu.go.id/berita/wujudkan-transformasi-digital-dan-tertib-pengelolaan-bmn-kementerian-pupr-gelar-rapat-kerja-pengelolaan-bmn-tahun-2022>
- Listiani, L., & Agustin, H. (2022). Pengaruh Inventarisasi, Kompetensi Aparatur, dan Pengendalian Internal terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(4), 861–882. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i4.637>
- Lounggina, T., & Peny, L. (2022). Peran Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi: Investigasi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2127–2142. <https://doi.org/10.36778/JESYA.V5I2.812>
- Ly, B. (2024). Inclusion leadership and employee work engagement: The role of organizational commitment in Cambodian public organization. *Asia Pacific Management Review*, 29(1), 44–52. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2023.06.003>

- Morgan, D. L. (1996). Focus groups. *Annual Review of Sociology*, 22, 129–152.  
<https://doi.org/10.1146/ANNUREV.SOC.22.1.129>
- Podrug, N. (2011). The strategic role of managerial stewardship behaviour for achieving corporate citizenship. *Ekonomski Pregled*, 62(7–8), 404–420.
- Pratama, A. P., Ghazali, A., Putranto, N. A. R., Iswari, K. R., Wisesa, A., & Febriansyah, H. (2015). Civil Servants' Competence in Indonesia: Suggestions for Future Research in the Context of Business. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 169(August 2014), 371–377.  
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.322>
- Pratiwi, R. Y. (2022). *Pentingnya Penilaian Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara*. Kementerian Keuangan.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14906/Pentingnya-Penilaian-Dalam-Pengelolaan-Barang-Milik-Negara.html>
- Prayogia, J. E., Azharb, I., & Zati, M. R. (2021). Pengaruh Pemahaman Regulasi, Sistem Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Manajemen Aset pada SKPK Kota Langsa. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)*, 2(6), 350–361.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah* (p. 128).  
[http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe\\_de\\_Desarrollo\\_Social\\_2020.pdf%0Ahttp://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/44540/44554](http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2020.pdf%0Ahttp://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/44540/44554)
- Prihatini, T., Noor Shodiq, A., & Anwar, S. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Regulasi, Kompensasi, Dan Asas – Asas Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Aset Pada Badan Usaha Milik Daerah (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang). *E-Jurnal Riset Akuntansi*, 09(02), 114–135.  
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/6135>
- Puspitarini, I., Firmansyah, A., & Handayani, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaL Pada Pengelolaan Barang Milik Negara. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 141–149.  
<https://doi.org/10.30871/jama.v1i2.501>
- R. Tjahjopurnomo. (2017). *Ki Hajar Dewantara “Pemikiran dan Perjuangannya”* (Vol. 1). Jakarta : Museum Kebangkitan Nasional
- Rachman, Y. S., Syarifuddin., & Amiruddin. (2023). Analysis of Disposal of Government-Owned Construction Assets Through Sales Mechanism in Asset Management Optimization (a Case Study At the South Sulawesi Regional Office of the National Road Implementing Agency). *Jurnal Ekonomi*, 12(3), 264–275.
- Rahmadhani, F., & Ariani, R. (2022). Kualitas Aparatur, SIMDA – BMD, Regulasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan BMD. *Jurnal Ekonomika*

*Dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), 291–301. <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i1.100>

- Ricardo, R., Astika, F., & Jepisah, D. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 12(1), 74–81. <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3325>
- Rosalina Weny, D. S. (2023). Analisis Optimalisasi Aset Bagian-Bagian Jalan Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara. *Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 14(2), 54–69.
- Scherer, R., Siddiq, F., & Tondeur, J. (2019). The technology acceptance model (TAM): A meta-analytic structural equation modeling approach to explaining teachers' adoption of digital technology in education. *Computers and Education*, 128(0317), 13–35. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.09.009>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2009). *Research Methods For Business : a Skill Building Approach*. Chichester : John Wiley and Sons.
- Skorkova, Z. (2016). Competency Models in Public Sector. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 230(May), 226–234. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.09.029>
- Sopaheluwakan<sup>1</sup>, J., Anakotta, F. M., Si, M., Ali, C. <sup>2</sup>, Kalau, A., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Universitas, B., & Ambon, P. (2022). Pengaruh Efektivitas Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Keahlian Pemakai, Terhadap Kinerja Pengelola Barang Milik Negara (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Kepulauan Aru). *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 2226–2235. <https://jurnal.widyagama.ac.id/index.php/cebi/article/view/207>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Syarbini Ikhsan, S. (2020). Pengaruh Implementasi Pengendalian Internal Dan Kompetensi Pengelola Terhadap Efektivitas Manajemen Aset Tetap Pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 9(2). <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v9i2.42675>
- Tabita, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Sistem Informasi Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Trikonomika*.
- Wang, K. J., Basuki, S. S. A., & Kurniati, N. (2023). A life-cycle asset management model by response surface method based optimization. *International Journal of Production Economics*, 263(June), 108957. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2023.108957>

Yustiana, H., Arifuddin, & Kartini. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Studi pada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang-Sulawesi Selatan). *Jurnal Cahaya Mandalika*, 646–654.

Zada, M., Khan, J., Saeed, I., Zada, S., & Yong Jun, Z. (2023). Linking public leadership with project management effectiveness: Mediating role of goal clarity and moderating role of top management support. *Heliyon*, 9(5), e15543. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15543>

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Kuesioner

<b>KUESIONER PENELITIAN</b>	
<b>Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem pengendalian intern dan Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi pada Satuan Kerja Kementerian PUPR di Wilayah Sulawesi Selatan</b>	
<p>Sehubungan dengan tesis program studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Kelas Kementerian PUPR, perkenalkan saya Masdayati bermaksud untuk menyusun tesis dengan judul tersebut di atas. Peneliti menyadari sepenuhnya, kehadiran kuesioner ini sedikit banyak akan mengganggu aktivitas Bapak/Ibu/Saudara yang sangat padat.</p> <p>Namun, dengan segala kerendahan hati peneliti memohon Bapak/Ibu/Saudara dapat meluangkan waktu sebentar untuk berpartisipasi dalam pengisian daftar pertanyaan berdasarkan keadaan yang sebenar-benarnya. Kerahasiaan identitas, data dan jawaban kuesioner ini akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.</p> <p>Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara yang telah bersedia berpartisipasi dalam pengisian daftar pernyataan ini</p>	
Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki – Laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Umur Responden	<input type="checkbox"/> : ≤ 30 tahun <input type="checkbox"/> 31 – 40 tahun <input type="checkbox"/> 41 - 50 tahun <input type="checkbox"/> > 50 th
Pendidikan terakhir	<input type="checkbox"/> : SMU <input type="checkbox"/> : Diploma <input type="checkbox"/> : S1 <input type="checkbox"/> : S2
Masa kerja	<input type="checkbox"/> : 1 – 5 tahun <input type="checkbox"/> : 6 – 10 tahun <input type="checkbox"/> : 11 – 15 tahun <input type="checkbox"/> : > 15 tahun
Petunjuk pengisian 1. Dimohon Bapak/Ibu/Saudara/Saudari responden menjawab pernyataan di	

- bawah ini dengan memberikan tanda (✓) pada kolom salah satu jawaban yang menurut anda sesuai dengan pengalaman atau kondisi anda
2. Adapun skor untuk masing-masing jawaban yaitu :
- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) | 4 = Setuju (S)         |
| 2 = Tidak Setuju (TS)         | 5 = Sangat Setuju (SS) |
| 3 = Netral (N)                |                        |

## Pernyataan Kuesioner

### 1. Pengelolaan BMN

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		TS	S	N	S	SS
<b>A.</b>	<b>Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)</b>					
1	Kuasa Pengguna Barang melaporkan BMN yang dikuasainya kepada pengelola barang dan pengguna barang					
2	Semua BMN telah ditetapkan status penggunaannya dan digunakan sesuai dengan tugas dan fungsinya					
<b>B.</b>	<b>Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN)</b>					
3	Pemanfaatan BMN dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang					
4	Pemanfaatan BMN dilaksanakan melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bagun guna serah/bangun serah guna dan kerjasama penyediaan infrastruktur					
<b>C.</b>	<b>Pemindahtanganan (BMN)</b>					
5	Pemindahtanganan BMN dilaksanakan melalui penjualan, tukar menukar, hibah serta penyertaan modal pemerintah					
6	Pelaksanaan pemindahtanganan BMN mendapatkan persetujuan dari pengguna barang dan Pengelola Barang					
<b>D.</b>	<b>Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)</b>					
7	Semua BMN telah dicatat dan lengkap pada sistem aplikasi BMN dan dilaporkan setiap semesteran dan tahunan					
8	Kuasa Pengguna Barang melakukan Inventarisasi BMN paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima tahun) dan telah membuat Kartu Inventaris Barang (KIB)					
<b>E.</b>	<b>Pengamanan Barang Milik Negara (BMN)</b>					
9	Kuasa Pengguna Barang menyimpan/mengarsipkan dokumen kepemilikan BMN secara tertib dan teratur					
10	BMN berupa tanah telah disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan					

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		TS	S	N	S	SS
	Perumahan Rakyat					
<b>F.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN)</b>					
11	Kuasa Pengguna Barang melakukan pemeliharaan terhadap BMN yang dikuasainya.					
12	Pemeliharaan dilaksanakan sesuai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan BMN					

## 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		TS	S	N	S	SS
	<b>Pengetahuan</b>					
1.	Saya memahami tugas dan fungsi serta uraian tugas dalam pelaksanaan pengelolaan BMN					
2.	Saya memahami pedoman mengenai prosedur dan proses pengelolaan BMN dengan baik					
	<b>Keterampilan</b>					
3.	Saya mampu Menyusun dan menyajikan laporan BMN dengan baik dan benar					
4.	Saya sering mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola BMN serta Menyusun laporan BMN					
	<b>Sikap/perilaku</b>					
5.	Saya selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai					
6.	Saya selalu menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan					

## 3. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		TS	S	N	S	SS
	<b>Lingkungan Pengendalian</b>					
1.	Tempat saya bekerja memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi serta pembagian kewenangan dan tanggung jawab pegawai					

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		TS	S	N	S	SS
2.	Pimpinan selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur atau aturan perilaku					
	<b>Penilaian Risiko</b>					
3.	Pimpinan melakukan analisis risiko secara menyeluruh terhadap peluang adanya ancaman terhadap pengelolaan BMN					
4.	Pimpinan mempunyai rencana manajemen untuk mengurangi risiko kecurangan pengelolaan BMN					
	<b>Aktivitas Pengendalian</b>					
5.	Terdapat pengawasan terhadap pemakaian/penggunaan aset BMN					
6.	Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset telah ditetapkan dan diimplementasikan dengan baik					
	<b>Informasi dan Komunikasi</b>					
7.	Petugas BMN telah menyampaikan laporan BMN dengan tepat waktu					
8.	Sistem informasi dalam organisasi menghasilkan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu					
	<b>Pemantauan</b>					
9.	Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat mekanisme/prosedur monitoring dan evaluasi					
10.	Instansi tempat saya bekerja selalu menindaklanjuti temuan/reviu dan saran yang diberikan oleh auditor (BPK/Inspektorat)					

#### 4. Pemanfaatan Sistem Informasi

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		TS	S	N	S	SS
<b>A.</b>	<b>Kebermanfaatan</b>					
1.	Sistem Informasi (SIMAN/SAKTI) yang digunakan mendukung peningkatan kinerja dan produktivitas dan efektivitas					
2.	Secara keseluruhan sistem informasi yang digunakan bermanfaat terhadap kinerja					
<b>B.</b>	<b>Kemudahan penggunaan</b>					
3.	Sistem Informasi (SIMAN/SAKTI) dapat dipelajari dan dioperasikan dengan mudah					
4.	Secara keseluruhan Sistem Informasi (SIMAN/SAKTI) membantu dalam menyelesaikan pekerjaan lebih cepat					

### 5. Komitmen Pimpinan

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		TS	S	N	S	SS
<b>A.</b>	<b>Komitmen Afektif</b>					
1.	Pimpinan selalu berkomunikasi dengan baik, mengendalikan emosi dan perasaan dalam melaksanakan pengelolaan barang milik negara					
2.	Pimpinan dapat diandalkan dalam kondisi apapun serta memiliki motivasi yang tinggi dalam rangka pengelolaan BMN					
<b>B.</b>	<b>Komitmen Normatif</b>					
3.	Pimpinan loyal terhadap instansi sehingga berpartisipasi aktif dalam pengelolaan barang milik negara					
4.	Pimpinan memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam rangka melaksanakan pengelolaan BMN					
<b>C.</b>	<b>Komitmen Berkelanjutan</b>					
5.	Pimpinan memformulasikan kebijakan terkait yang menguntungkan negara dari pengelolaan BMN					
6.	Pimpinan memformulasikan kebijakan yang mengefisienkan biaya terkait pengelolaan BMN					

## Hasil Uji Data SPSS 24

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.836 <sup>a</sup>	.699	.684	.32700

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Sistem Informasi, Pengendalian Internal, Kompetensi SDM

b. Dependent Variable: Pengelolaan Barang Milik Negara

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.836 <sup>a</sup>	.699	.684	.32700

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Sistem Informasi, Pengendalian Internal, Kompetensi SDM

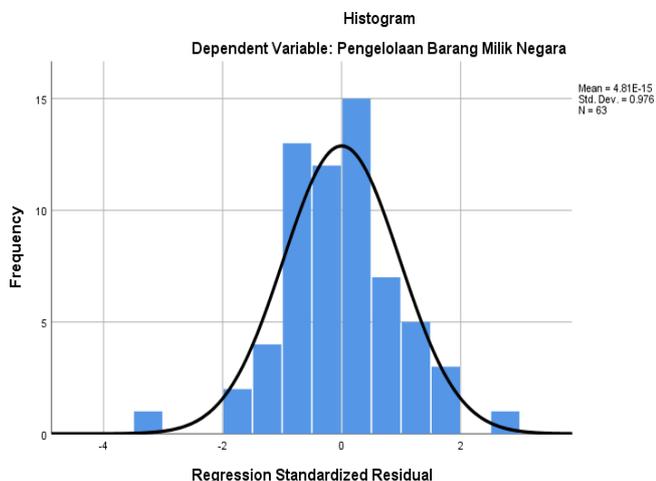
b. Dependent Variable: Pengelolaan Barang Milik Negara

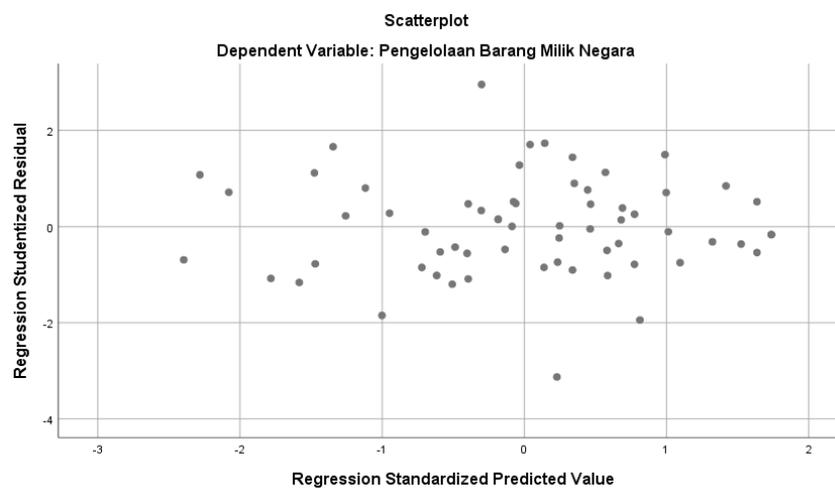
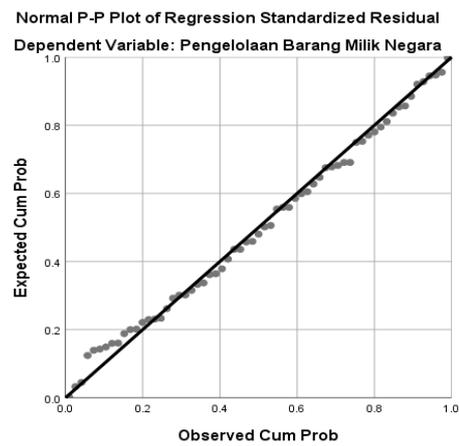
### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.279	.383		-.728	.470
	Kompetensi SDM	.311	.092	.310	3.394	.001
	Pengendalian Internal	.526	.092	.513	5.742	.000
	Pemanfaatan Sistem Informasi	.196	.069	.218	2.863	.006

a. Dependent Variable: Pengelolaan Barang Milik Negara

## Charts





### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.31899042
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.051
	Negative	-.071
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.886 <sup>a</sup>	.785	.757	.28670

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.345	2.717		1.967	.054
	Kompetensi SDM	-1.154	.781	-1.151	-1.479	.145
	Pengendalian Internal	2.281	.605	2.223	3.771	.000
	Pemanfaatan Sistem Informasi	-1.553	.559	-1.720	-2.780	.007
	Komitmen Pimpinan	-1.248	.619	-1.173	-2.016	.049
	X1_Z	.325	.171	2.025	1.903	.062
	X2_Z	-.397	.136	-2.607	-2.912	.005
	X3_Z	.395	.126	2.801	3.132	.003

a. Dependent Variable: Pengelolaan Barang Milik Negara